



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## ( L K I P )

KOTA BIMA

TAHUN 2018



2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ijin dan hidayah-Nya, salah satu tahapan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyelenggaraan urusan dan kewenangan Pemerintah Kota Bima sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagaimana bentuk pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Pemerintah Kota Bima, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2018 dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018. Laporan kinerja ini menyajikan berbagai hasil capaian kinerja, prestasi dan keberhasilan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima yang telah bekerja keras bersama dalam mencapai berbagai sasaran strategis pembangunan pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bima.

WALIKOTA BIMA,



**H. MUHAMMAD LUTFI, SE**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    Pendahuluan .....	7
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	7
B. Aspek Strategis .....	11
C. PDRB Per Kapita .....	28
BAB II.  Perencanaan Kerja .....	46
2.1. Visi, Misi Dan Tujuan Sasaran Pembangunan .....	46
2.2. Prioritas Daerah .....	53
2.3. Indikator Kinerja Utama Kota Bima .....	53
BAB III. Akuntabilitas Kinerja .....	63
3.1, Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bima .....	64
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	65
3.3. Analisa Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis...	113
3.4. Realisasi Anggaran .....	117
3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	124
BAB IV.  Penutup .....	126
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	126

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administratif Kota Bima .....	10
Tabel 1.2. Luas Lahan Menurut Kemiringan Dan Kecamatan di Kota Bima .....	12
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin .	12
Tabel 1.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2018 .....	13
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umum .....	14
Tabel 1.6. Prosentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama .	15
Tabel 1.7 Prosentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Menurut Jenis Kelamin tahun 2017 .....	15
Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 1.9. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Bima Tahun 2017.	18
Tabel 1.10. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2017 .....	18
Tabel 1.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 – 2017.....	23
Tabel 1.12. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 – 2017.....	24
Tabel 1.13 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017 .....	26
Tabel 1.14. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2013-2017 .....	27
Tabel 1.15. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kota Bima.....	28
Tabel 1.16. Rumusan Permasalahan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.....	30
Tabel 1.17. Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan <b>Ekonomi</b> Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah .....	33
Tabel 1.18. Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	36
Tabel 1.19. Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan .....	38
Tabel 1.20. Rumusan Permasalahan Pembangunan pada tiap Urusan .....	39
Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran .....	49

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kota Bima tahun 2018 .....	54
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 .....	56
Tabel 2.4 Program Prioritas Pembangunan .....	57
Tabel 3.1. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian .....	63
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bima .....	64
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2018.....	67
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	67
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	67
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional di Kota Bima Tahun 2018 .....	69
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	69
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai UN Sekolah Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	70
Tabel 3.9. Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima Tahun 2018 .....	71
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	72
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan manusia Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	73
Tabel 3.12. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2018 .....	73
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	74
Tabel 3.14. Data Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima tahun 2014-2018 .....	74
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	75
Tabel 3.16. Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima Tahun 2018 .....	77
Tabel 3.17. Jumlah Angkatan Kerja Kota Bima tahun 2018.....	77
Tabel 3.18. Realisasi Indikator Kinerja Angka Pengangguran Terbuka di Kota Bima pada Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.	77
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Pengangguran terbuka Tahun 2018 terhadap target RPJMD.....	78
Tabel 3.20. Realisasi Kinerja Indikator Angka balita Gizi Buruk di Kota Bima Tahun 2018 .....	79

Tabel 3.21.Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka balita Gizi Buruk di Kota Bima Tahun 2018 dengan Tahun-tahun sebelumnya.....	80
Tabel 3.22.Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	81
Tabel 3.23.Realisasi Kinerja Indikator Angka kematian ibu melahirkan Kota Bima Tahun 2018 .....	82
Tabel 3.24.Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka kematian ibu melahirkan Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	82
Tabel 3.25.Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih Kota Bima Tahun 2018 .....	85
Tabel 3.26.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kota Bima Tahun 2018 dengan Tahun-tahun sebelumnya .....	86
Tabel 3.27.Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air bersih .....	86
Tabel 3.28.Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2018 terhadap target RPJMD .....	86
Tabel 3.29.Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2018 .....	88
Tabel 3.30.Data Rumah Layak Huni Kota Bima tahun 2018 .....	88
Tabel 3.31.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah layak Huni tahun 2018 dengan tahun sebelumnya .....	89
Tabel 3.32.Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah .....	89
Tabel 3.33.Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik di Kota Bima Tahun 2018 .....	90
Tabel 3.34.Capaian Kinerja Rumah Tangga Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2014-2018 .....	91
Tabel 3.35..Database Sanitasi KOTA BIMA Tahun 2018.....	92
Tabel 3.36.Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2018 .....	93
Tabel 3.37.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya .....	94
Tabel 3.38.Realisasi Indikator Opini BPK terhadap LKPD Kota Bima Tahun 2018 .....	97
Tabel 3.39.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD tahun 2018 dengan tahun sebelumnya .....	98
Tabel 3.40.Realisasi Indikator Persentase OPD dengan Indeks SAKIP Baik di Kota Bima Tahun 2018 .....	99
Tabel 3.41.Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2018 .....	102

Tabel 3.42. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya .....	102
Tabel 3.43. Realisasi Indikator Kinerja Pendapatan per kapita Kota Bima Tahun 2018 .....	105
Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pendapatan per kapita Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	106
Tabel 3.45. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2018 .....	107
Tabel 3.46. Pengukuran Kinerja Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018 .....	108
Tabel 3.47. Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Permukiman Kumuh ..	109
Tabel.3.48. Pengukuran Kinerja Persentase permukiman kumuh tertangani Tahun 2014-2018 .....	110
Tabel 3.49. Lampiran Keputusan Walikota Bima Nomor 524 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bima Tahun 2018 .....	110
Tabel 3.50. Realisasi Indikator Kinerja Persentase luas kawasan tepian air yang tertata Kota Bima Tahun 2018 .....	112
Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase luas kawasan tepian air yang tertata Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	112
Tabel 3.52. Tingkat Keberhasilan Capaian Setiap Indikator Kinerja Utama Kota Bima Tahun 2018 .....	114
Tabel 3.53. Kategori Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kota Bima tahun 2018 .....	115
Tabel 3.54. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2018.. .....	116
Tabel 3.55. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .....	116
Tabel 3.56. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 .....	117
Tabel 3.57. Rekapitulasi Belanja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 ....	118
Tabel 3.58. Realisasi Anggaran Program Pembangunan Setiap Sasaran Strategis .....	119
Tabel 3.59. Hasil Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setiap Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penjelasan Umum Organisasi**

Pemerintah Kota Bima dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintahan Kota Bima menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD

untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip taat pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun administrasi pemerintahan di Kota Bima, Walikota dibantu oleh kepala perangkat daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Perangkat Daerah melaksanakan berbagai urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima maupun Peraturan Walikota Bima tentang Susunan, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima mencakup 4 (empat) urusan yaitu: urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban, sosial. Kemudian yang kedua adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Adapun kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang meliputi: kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian. Sedangkan urusan penunjang meliputi: administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Adapun organisasi perangkat Daerah Kota Bima menurut Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016, yaitu :

- a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - 1) Sekretaris Daerah
  - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesra, membidangi :
    - ) Bagian Administrasi Pemerintahan
    - ) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
    - ) Bagian Hukum
  - 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :
    - ) Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
    - ) Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
  - 4) Asisten Administrasi Umum, membidangi :
    - ) Bagian Organisasi

) Bagian Humas dan Protokol

) Bagian Umum

- b. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - 1) Sekretaris DPRD
  - 2) Bagian Hukum dan Persidangan
  - 3) Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
  - 4) Bagian Keuangan
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g. Dinas Sosial
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- k. Dinas Tenaga Kerja
- l. Dinas Ketahanan Pangan
- m. Dinas Perhubungan
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
- p. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
- q. Dinas Pariwisata
- r. Dinas Statistik
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan
- u. Satpol PP
- v. Inspektorat
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- aa. Kecamatan Rasane Barat

- bb. Kecamatan Mpunda
- cc. Kecamatan Raba
- dd. Kecamatan Rasanae Timur
- ee. Kecamatan Asakota

## B. Aspek Strategis

### 1. Kondisi Geografis

#### a. Batas Administrasi

Kota Bima Secara geografis berada di bagian timur Pulau Sumbawa yang terletak antara 118° 41' 00" Bujur Timur - 118° 48' 00" Bujur Timur dan 8° 30' 00" Lintang Selatan - 8° 20' 00" Lintang Selatan. Adapun secara administratif Kota Bima berbatasan dengan wilayah-wilayah :

- Bagian Utara: Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima
- Bagian Timur : Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima
- Bagian Selatan : Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
- Bagian Barat: Teluk Bima

#### b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km<sup>2</sup> mencakup 5 (lima) kecamatan dan pada tahun 2017 mengalami pemekaran dari 38 (tiga puluh delapan) kelurahan menjadi 41 (empat puluh satu) kelurahan. Kecamatan Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 60,03 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km<sup>2</sup>. Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Pembagian Wilayah Administratif Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
<b>Jumlah I</b>			<b>10.14</b>
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
<b>Jumlah II</b>			<b>15.28</b>
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
<b>Jumlah III</b>			<b>63.73</b>
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,60
		4. Kel. Kolo	26,49
		5. Jatibaru Timur	
		6. Ule	
<b>Jumlah IV</b>			<b>69,03</b>
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
		8. Kel. Oi Mbo	
<b>Jumlah V</b>			<b>64.07</b>
<b>Jumlah I + II + III + IV + V</b>			<b>222,25</b>

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima

### c. Topografi

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha.

**Tabel 1.2.**  
**Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima**

No	Kecamatan	Datar ( 0 - 2 % )	Bergelombang ( 2 - 15 % )	Curam ( 15 - 40 % )	Sangat Curam ( > 40 % )
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
J u m l a h		9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

Pada umumnya semua wilayah kecamatan Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 persen. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

## 2. Kondisi Demografis

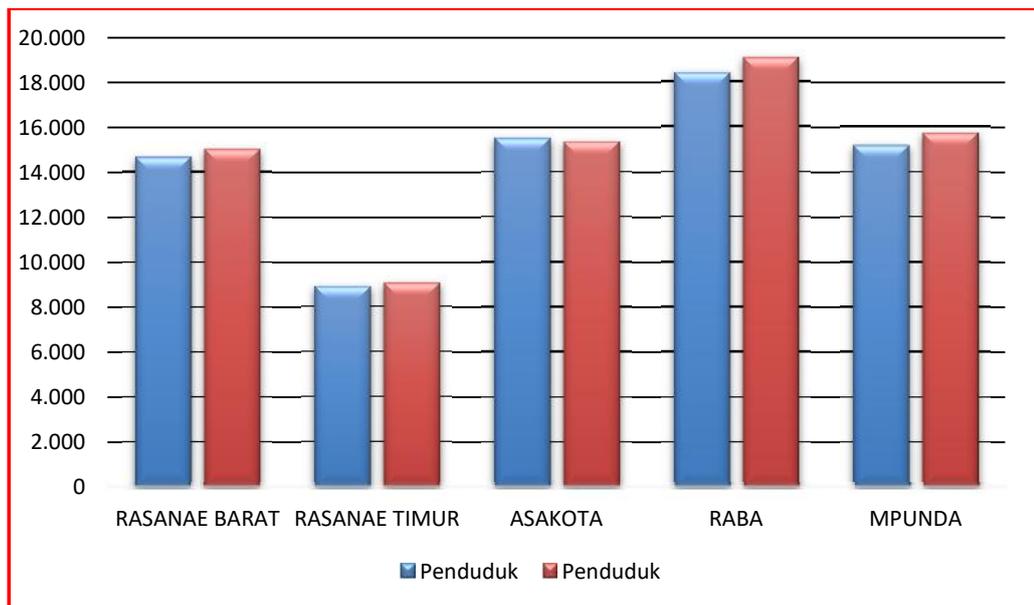
### a. Jumlah Penduduk Kota Bima

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2018 mengalami peningkatan 2,15% dari 143.804 jiwa menjadi 146.959 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 72.722 jiwa dan perempuan 74. 237 jiwa. Jika dilihat menurut kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 37.502 jiwa, dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Timur sebesar 17.953 jiwa..

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	RASANAЕ BARAT	14.687	15.034	29.721
2	RASANAЕ TIMUR	8.902	9.051	17.953
3	ASAKOTA	15.512	15.343	30.855
4	RABA	18.423	19.079	37.502
5	MPUNDA	15.198	15.730	30.928
<b>Kota Bima</b>		<b>72.722</b>	<b>74.237</b>	<b>146.959</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2018)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Kecamatan Raba adalah kecamatan dengan jumlah penduduk yang terpadat, per 1 km<sup>2</sup> wilayahnya ditempati oleh 2.931,07 Jiwa. Sedangkan pada kecamatan Rasanae Timur setiap 1 km<sup>2</sup> wilayahnya hanya dihuni oleh 280,21 jiwa.

**Tabel 1.4.**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
1	RASANA E BARAT	29.721	10,14	2.931,07
2	RASANA E TIMUR	17.953	64,07	280,21
3	ASAKOTA	30.855	69,03	466,98
4	RABA	37.502	63,73	588,45
5	MPUNDA	30.928	15,28	2.024,08
	<b>Kota Bima</b>	<b>146.959</b>	<b>222,25</b>	<b>661,2</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2018, data diolah)

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk yang berusia usia 30-34 tahun yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia yang lebih tua ataupun yang lebih muda.

Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.5.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**  
**Tahun 2018**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
00-04	6.106	5.718	11.824
05-09	7.432	6.964	14.396
10-14	7.271	6.620	13.891
15-19	5.494	5.658	11.152
20-24	5.805	5.982	11.787
25-29	5.931	6.195	12.126
30-34	6.305	6.464	12.769
35-39	5.965	6.405	12.370
40-44	5.224	5.669	10.893
45-49	4.575	4.803	9.378
50-54	3.655	4.137	7.792
55-59	2.971	3.100	6.071
60-64	2.209	2.445	4.654
65-69	1.633	1.692	3.325
70-74	1.097	1.283	2.380
≥ 75	1.049	1.102	2.151
<b>JUMLAH</b>	<b>72.722</b>	<b>74.237</b>	<b>146.959</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018*

#### c. Mata Pencaharian Penduduk/Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja di Kota Bima pada tahun 2017 mencapai 86.954 orang, yang terdiri dari 48.379 laki-laki dan 38.575 perempuan. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja sebanyak 33.224 jiwa yang terdiri dari 9.766 laki-laki dan 23.458 perempuan. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 pada angka 67,02% sedangkan pada

tahun 2017 mencapai 72,35%. Untuk Tingkat Pengangguran mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2016 mencapai 10,15% sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 3,51%.

Selengkapnya jumlah penduduk menurut kegiatan utama di Kota Bima tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.6.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Kegiatan Utama	2017		
	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	<b>48.379</b>	<b>38.575</b>	<b>86.954</b>
- Bekerja	46.364	37.541	<b>83.905</b>
- Pengangguran Terbuka	2.015	1.034	<b>3.049</b>
Bukan Angkatan Kerja	<b>9.766</b>	<b>23.458</b>	<b>33.224</b>
- Sekolah	5.068	5.289	<b>10.357</b>
- Mengurus Rumah Tangga	3.158	17.095	<b>20.253</b>
- Lainnya	1.540	1.074	<b>2.614</b>
<b>Jumlah</b>	<b>58.145</b>	<b>62.033</b>	<b>120.178</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,2	62,18	72,35
Tingkat Pengangguran (%)	4,17	2,68	3,51

Sumber : BPS Kota Bima (Kota Bima Tahun 2018)

Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, ada 4 (empat) lapangan pekerjaan utama dengan prosentase terbesar yaitu :

- Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan : 30,57 %
- Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel: 21,83 %
- Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan : 13,47 %
- Industri Pengolahan : 9,55 %

Selengkapnya jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kota Bima tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.7.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**  
**Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan**  
**Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2017**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	Jumlah	%
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	7.643	3.660	11.303	13.47
2	Pertambangan dan Penggalian	3.224	1.921	5.145	6.13
3	Industri Pengolahan	3.651	4.364	8.015	9.55
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	496	207	703	0.83
5	B a n g u n a n	6.703	47	6.750	8.04
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	4.145	14.169	18.314	21.82
7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	4.563	272	4.835	5.76
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	2.501	685	3.186	3.79
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.438	12.216	25.654	30.57

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

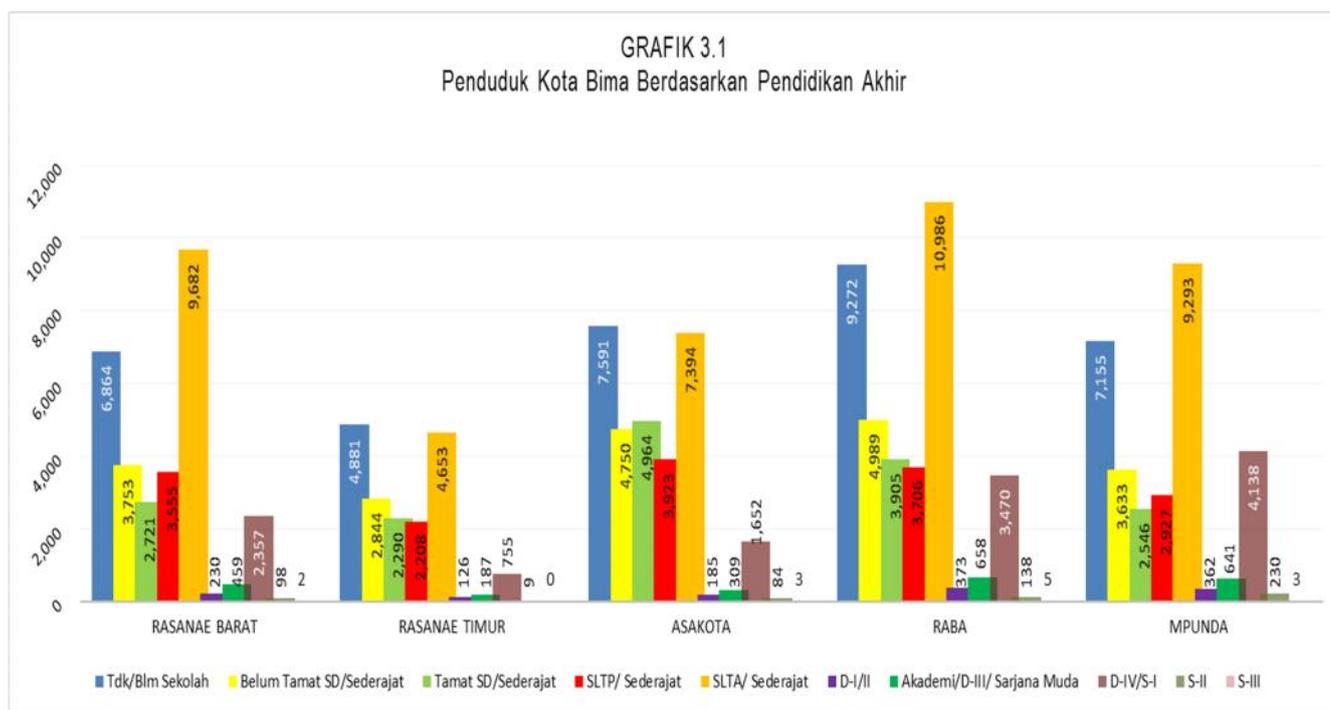
Jumlah penduduk di Kota Bima pada tahun 2018 jika dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat memiliki jumlah paling besar yaitu 42.008 orang atau 28,58%. Selengkapnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bima pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

KECAMATAN	Tdk/Blm Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D-I/II	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	D-IV/S-I	S-II	S-III	Jumlah
RASANAEBARAT	6.864	3.753	2.721	3.555	9.682	230	459	2.357	98	2	29.721
RASANAETIMUR	4.881	2.844	2.290	2.208	4.653	126	187	755	9	0	17.953
ASAKOTA	7.591	4.750	4.964	3.923	7.394	185	309	1.652	84	3	30.855
RABA	9.272	4.989	3.905	3.706	10.986	373	658	3.470	138	5	37.502
MPUNDA	7.155	3.633	2.546	2.927	9.293	362	641	4.138	230	3	30.928
JUMLAH	35.763	19.969	16.426	16.319	42.008	1.276	2.254	12.372	559	13	146.959

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

GRAFIK 3.1  
Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Akhir



### 3. Kondisi Perekonomian

#### A. Potensi Unggulan Daerah

##### a. Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Bima serta masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Namun, seiring dengan makin berkembangnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan wilayah, alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif terutama di kawasan pusat kota menjadi kawasan permukiman baru pun tidak terhindarkan. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Sebagai lahan untuk bercocok tanam komoditas pertanian, lahan sawah terbagi menjadi sawah dengan irigasi teknis, dengan luas 2.073 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 349 ha. Lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan

Rasanae Timur dan di Kecamatan Raba. Dua kecamatan ini pun memiliki jaringan irigasi teknis yang memadai dibanding dengan kecamatan yang lain.

**Tabel 1.9.**  
**Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Bima Tahun 2017**

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					
	Rasanae Barat	Mpunda	Rasanae Timur	Raba	Asakota	Kota Bima
1. Irigasi Teknis	5	309	804	659	257	2.073
2. Tadah Hujan	-	-	269	50	30	349
3. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
<b>Total Tahun 2017</b>	<b>5</b>	<b>309</b>	<b>1.112</b>	<b>709</b>	<b>287</b>	<b>2.422</b>
Total Tahun 2015	3	318	957	713	276	2.267
Total Tahun 2014	3	320	967	705	276	2.271
Total Tahun 2013	3	321	968	706	246	2.244

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

**Tabel 1.10. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2017**

Jenis Data	Komoditas							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi kayu	Ubi Jalar
1. Luas Panen (Ha)	5 103	1 841	2 065	934	62	294	97	2
2. Produksi (Ton)	28 260	6 005	15 515	1 233	71	336	2 031	26
3. Produktivitas (Kw/Ha)	55,38	32,62	75,13	13,20	11,45	11,42	209,38	130,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

Luas panen padi sawah di Kota Bima tahun 2017 seluas 5.103 Ha dengan produksi gabah sebesar 28.260 ton. Total luas panen tanaman jagung pada tahun 2017 adalah seluas 1.217 Ha. Hasil produksi komoditas jagung cukup tinggi dibanding komoditas lain yang besarnya mencapai 15.515 ton.

## **b. Perdagangan**

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Jenis sarana perdagangan di Kota Bima pada tahun 2013 meliputi: 6 unit pasar umum, 457 unit toko, 481 unit kios/warung, 51 unit rumah makan.

Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, pada tahun 2013 tercatat 2.409 perusahaan perdagangan yang ada di Kota Bima, dengan rincian 57 perusahaan perdagangan besar, 171 perusahaan perdagangan menengah, dan 2.181 perusahaan perdagangan kecil. Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

## **c. Pariwisata**

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima meliputi wisata budaya dan wisata alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana saat ini masih terbatas pada wisatawan lokal. Jika dilihat secara geografis, posisi Kota Bima berada di antara dua kawasan yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Sehingga secara geografis Kota Bima sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya mengingat letak wilayah yang cukup strategis. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Bima secara sekilas dapat diuraikan sebagai berikut.

### **• Istana Kayu Asi Bou**

Istana ini terletak di samping timur Istana Bima (sekarang Museum Asi Mbojo). Dinamakan Asi Bou karena didirikan setelah pendirian Istana Bima pada tahun

1927, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1936). Asi Bou dibangun oleh untuk Putera Mahkota Muhammad Salahuddin.

- **Masjid Muhammad Salahuddin**

Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah dengan Wajir Ismail pada tahun 1737. Masjid ini terletak di Kampung Sigi atau di sebelah selatan lapangan Sera Suba (Jalan Soekarno Hatta).

- **Museum Asi Mbojo**

Museum Asi Mbojo dulunya merupakan Istana bagi Raja dan Sultan Bima. Museum ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr. Obzicshteer Rehata. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah diakses. Di Museum ini terdapat silsilah/tata urutan Raja dan Kesultanan Bima, benda tata urutan kepangkatan pemerintahan, barang-barang serta pakain adat yang digunakan Istana Kerajaan, para prajurit serta masyarakat pada jaman itu. Selain itu juga dipamerkan benda-benda yang tidak hanya berasal dari jaman kerajaan dan kesultanan, tetapi juga benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan kesultanan Bima.

- **Museum Samparaja**

Museum Samparaja merupakan museum yang ada di Kota Bima selain Museum Asi Mbojo. Museum ini terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Moggonao Kota Bima. Koleksi yang ada di museum ini antara lain Kitab BO yang asli, kitab yang membahas ihwal Kerajaan Bima pada abad 14 Masehi. Selain itu terdapat benda-benda peninggalan kesultanan Bima.

- **Pantai Ni'u**

Pantai Ni'u berada di sisi timur Teluk Bima, di jalan lintas Bima-Sumbawa sekitar 3,5 km dari terminal Dara Kota Bima. Lokasinya yang berada di tepi jalan nasional ini menjadikan pantai ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Obyek wisata ini cukup ramai dikunjungi wisatawan lokal, terutama pada hari-hari libur. Di kawasan ini terdapat gazebo-gazebo yang dibangun Pemerintah

Kota Bima dan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati panorama pantai kawasan ini.

- **Pantai Lawata**

Pantai Lawata merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama bagi masyarakat Kota Bima. Di kawasan pantai ini pengunjung dapat menikmati gai beryang tersedia dan melakukan aktifitas seperti berenang.

- **Pantai Amahami**

Pantai Amahami juga merupakan tempat tujuan bagi masyarakat Kota Bima untuk berwisata. Kawasan pantai ini ramai terutama pada sore dan malam hari, dengan berbagai aktifitas yang ada seperti pedagang kaki lima. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Lawata atau berada sebelum Pantai Lawata dari arah Terminal Dara. Selain pantai-pantai tersebut, di kawasan pesisir Teluk Bima masih terdapat obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Kolo dan Pantai So Ati.

- **Pantai Kolo**

Selain Pantai Amahami, Pantai Lawata, Pantai Ni'u dan Pantai Ule, terdapat sebuah pantai lain yang tidak kalah eksotik, yaitu Pantai Kolo. Pantai ini terletak di kawasan Perairan Kolo. Kapal-kapal laut yang hendak menuju Pelabuhan Bima harus melalui Perairan Kolo yang merupakan satu-satunya pintu masuk menuju pelabuhan Bima. Selain ramai dikunjungi para pelancong, pantai ini juga menawarkan panorama dan keindahan yang memang layak diancungin jempol. Dukungan akses jalan menuju kawasan wisata ini pun dapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian, manajemen pengelolaannya harus ditata dengan lebih profesional agar di masa-masa yang akan datang potensi kawasan wisata ini dapat tergali secara lebih optimal.

Sebagai pendukung pariwisata, terdapat hotel, losmen dan *homestay* yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Bima. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 18 unit, dengan jumlah kamar yang ada sebanyak 427 kamar dan tempat tidur sebanyak 649 buah.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,60 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 2,75 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,76 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,14 persen (angka ini meningkat dari 22,57 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,54 persen (turun dari 14,63 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,19 persen (turun dari 12,23 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,18 persen (turun dari 10,29 persen di tahun 2013) dan Konstruksi sebesar 9,07 persen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya kategori Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan

usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

**Tabel 1.11.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 - 2017**

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%								
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	336.300,89	15,44	375.446,07	14,06	419 103,64	14,00	456 132,74	13,82	493 346,96	13,54
B Pertambangan dan Penggalian	8.954,16	0,41	10 339,67	0,39	11 602,50	0,39	12 360,28	0,37	14 097,66	0,39
C Industri Pengolahan	80.022,40	3,67	84 973,46	3,18	92 352,46	3,08	102 837,40	3,12	110 814,31	3,04
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.023,22	0,18	4 453,68	0,17	4 806,06	0,16	6 189,54	0,19	6 715,10	0,18
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	812,44	0,04	1.062,74	0,04	1 133,97	0,04	1 238,97	0,04	1 348,72	0,04
F Konstruksi	206.177,73	9,47	232 528,23	8,71	262 620,58	8,77	292 775,06	8,87	330 481,46	9,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483.862,68	22,22	611 022,81	22,88	690 154,42	23,05	776 810,06	23,53	879 770,47	24,14
H Transportasi dan Pergudangan	233.209,92	10,71	271 700,05	10,17	304 326,98	10,16	334 801,01	10,14	371 197,84	10,18
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53.703,74	2,47	79 856,60	2,99	91 206,42	3,05	102 539,52	3,11	113 992,69	3,13
J Informasi dan Komunikasi	38.284,13	1,76	44 737,74	1,57	44 737,74	1,49	49 111,33	1,49	55 619,45	1,53
K Jasa Keuangan dan Asuransi	50.203,07	2,31	62 .667,71	2,35	68 924,34	2,30	76 959,25	2,33	88.943,55	2,44
L Real Estate	109.062,67	5,01	146 189,59	5,47	163 474,41	5,46	179 414,50	5,44	195 907,11	5,38
M Jasa Perusahaan	7.585,39	0,35	9 669,24	0,36	10 675,67	0,36	11 676,75	0,35	12 829,34	<b>0,35</b>
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241.203,93	11,08	348 307,37	13,04	395 400,82	13,21	419 257,39	12,70	444 130,76	12,19
O Jasa Pendidikan	167.086,93	7,67	210 690,68	7,89	233 738,97	7,81	260 148,87	7,88	284 562,99	7,81
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.729,13	3,48	86 765,99	3,25	94 918,44	3,17	103 274,42	3,13	111 597,54	3,06

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%								
Q Jasa lainnya	81.321,41	3,73	93 521,26	3,50	104 950,21	3,51	115 182,20	3,49	129 372,78	3,55
<b>PDRB</b>	<b>2.177.543,21</b>	<b>100</b>	<b>2.671 111,92</b>	<b>100</b>	<b>2.994.127,63</b>	<b>100</b>	<b>3.300.709,27</b>	<b>100</b>	<b>3.644.728,72</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 1.12.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 – 2017**

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	348 728,89	3,70	362 720,26	4,01	369 630,11	1,91	386 436,04	4,55
B Pertambangan dan Penggalian	9 541,55	6,36	10 247,07	7,39	10 883,88	6,21	11 738,27	7,85
C Industri Pengolahan	83 091,96	3,84	86 266,01	3,82	91 305,57	5,84	96 369,39	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	5 624,75	39,81	5 329,26	-5,25	6 253,89	17,35	6 472,08	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	839,68	3,35	860,19	2,44	899,57	4,58	949,13	5,51
F Konstruksi	219 580,18	6,50	234 125,70	6,62	253 666,65	8,35	278 069,38	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	519 259,27	7,32	556 890,99	7,25	601 525,03	8,01	652 960,52	8,55
H Transportasi dan Pergudangan	246 169,98	5,56	260 644,79	5,88	274 880,23	5,46	295 740,54	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57 118,64	6,36	60 993,37	6,78	65 947,50	8,12	70 367,02	6,70
J Informasi dan Komunikasi	40 903,95	6,84	43 826,09	7,14	47 570,24	8,54	51 356,84	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	53 276,78	6,12	56 675,02	6,38	60 744,13	7,18	66 562,90	9,58
L Real Estate	115 390,71	5,80	122 808,55	6,43	129 988,46	5,85	137 575,22	5,84
M,N Jasa Perusahaan	8 106,89	6,87	8 524,27	5,15	8 979,99	5,35	9 489,15	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253 082,08	4,92	262 778,38	3,83	269 722,21	2,64	277 004,71	2,70

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%						
P Jasa Pendidikan	177 858,43	4,55	189 031,70	6,45	200 136,14	6,28	212 677,87	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kgt Sosial	79 558,07	5,06	83 773,40	5,30	88 707,45	5,89	93 622,10	5,54
R,S,T,U Jasa lainnya	87 701,70	7,85	92 992,43	6,03	99 127,45	6,60	107 008,09	7,95
PDRB	2 305 833,52	5,89	2 438 487,46	5,75	2 579 968,51	5,80	2 754 399,26	6,76

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2,75 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,58 trilyun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan Sukarno Hatta dan perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang yang melanda Kota Bima pada akhir bulan Desember 2016. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat **mengalami pertumbuhan positif** namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,62 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,58 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,55 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,95 persen, lapangan usaha Jasa Pertambangan dan Pengalihan sebesar 7,85 persen, lapangan usaha

Transportasi dan Pergudangan 7,59 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,70 persen, Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah Lapangan usaha Real Estat sebesar 5,84 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 5,67 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,55 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,54 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,51 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas 3,49 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,70 persen.

**Tabel 1.13.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha**  
**(persen) Tahun 2013-2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan	1,94	3,70	4,01	1,91	4,55
B Pertambangan dan Penggalian	(5,10)	6,36	7,39	6,21	7,85
C Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	39,81	-5,25	17,35	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
F Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
H Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,56	5,88	5,46	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
J Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	6,12	6,38	7,18	9,58
L Real Estate	6,00	5,80	6,43	5,85	5,84
M,N Jasa Perusahaan	4,89	6,87	5,15	5,35	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,36	4,92	3,83	2,64	2,70
P Jasa Pendidikan	4,55	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,38	5,06	5,30	5,89	5,54
R,S, Jasa lainnya	7,54	7,85	6,03	6,60	7,95
<b>PDRB</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,75</b>	<b>5,80</b>	<b>6,76</b>

1. Sumber : BPS Kota Bima, 2018

2. \*) Angka Sementara ; \*\*) Angka Sangat Sementara

### C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,90 juta rupiah (lihat tabel 11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 1.14.**  
**PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2013-2017**

<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
- ADHB	2.374	2.671	2.994	3.301	3.645
- ADHK	2.178	2.306	2.438	2.580	2.754
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
- ADHB	15.504	17.079	18.744	20.237	21.902
- ADHK	14.233	14.743	15.266	15.818	16.552
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/	3,30	3,66	3,54	3,62	4,64
<b>Jumlah Penduduk (ribu orang)</b>	153,1	156,4	159,7	163,1	166,4
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk</b>	2,20	2,15	2,13	2,11	2,03

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

### D. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara

permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Selama periode 2013-2017 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2013-2017 yaitu di tahun 2016 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2017.

3.

**Tabel 1.15.**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kota Bima**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	10,06	7,16	4,29	3,10	4,04

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

## **E. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan pembangunan daerah Kota Bima diidentifikasi melalui kajian data dan informasi serta hasil evaluasi pembangunan daerah. Permasalahan utama pembangunan Kota Bima dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

## **1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan**

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima berhubungan dengan masalah pokok antara lain; derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya akses dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan serta nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu - bayi - balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kota Bima mencapai nilai 74,36 Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 66,58 Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten di NTB, nilai IPM Kota Bima hanya kalah dari Kota Mataram yang sudah mencapai angka 77,84. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Bima masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah atau melanjutkan sekolah. Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017, namun Pemerintah Kota Bima harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Selain itu, Kebijakan

Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 1.16.**

**Rumusan Permasalahan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi	Kurangnya asupan dan kecukupan gizi
		Pernikahan dini
		Tingkat pendidikan (kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan)
		Lingkungan yang kurang sehat
		Komplikasi penyakit lainnya
		Pelayanan kesehatan yang terstandar belum merata di seluruh wilayah
Masih tingginya Angka Gizi Buruk	Masih tingginya Angka Gizi Buruk	Kurangnya asupan gizi keluarga
		Kemiskinan
		Tingkat pendidikan (kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan)
Jaminan kesehatan penduduk miskin belum sepenuhnya tercover	Jaminan kesehatan penduduk miskin belum sepenuhnya tercover	Data kemiskinan yang tidak terupdate setiap tahun
		Alokasi anggaran untuk subsidi kesehatan masyarakat miskin masih kurang
Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Masih rendahnya sarana/prasarana pelayanan di tingkat puskesmas, pustu, maupun polindes
		Belum adanya rumah sakit rujukan yang benar-benar representatif
		Faktor prilaku masyarakat yang masih tidak terbiasa dengan jamban keluarga
		Data base tentang rumah tangga yang memiliki jamban keluarga belum terupdate
Akses layanan dan kualitas penyelenggaraan	Angka putus sekolah masih relatif tinggi	Keterbatasan biaya (kemiskinan)
	Belum meratanya akses	Beasiswa untuk masyarakat

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah	
pendidikan masih belum optimal	layanan pendidikan khususnya untuk warga miskin dan difabel	miskin masih terbatas	
		sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pinggiran kota sangat terbatas	
		Distribusi guru yang kurang merata	
	Kualitas penyelenggaraan manajemen pendidikan masih belum optimal/ sekolah tersertifikasi		Belum dibangun unit pengelolaan pengaduan masyarakat
			Dana operasional penyelenggaraan pendidikan yang terbatas
			Sarana pembelajaran berbasis IT masih sangat terbatas
			Penyelenggaraan penjaminan mutu yang belum optimal
	Guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten tidak merata dan terbatas		Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang berpendidikan tinggi dan kompeten masih sangat terbatas
			Beasiswa pendidikan untuk guru berprestasi masih sangat terbatas
	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang merata		Updating database sarana dan prasarana pendidikan belum optimal
Dukungan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana belum optimal			
Rendahnya minat baca		Partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi masih terbatas	
		Belum ada perpustakaan daerah yang representatif	
		Koleksi buku pada perpustakaan sekolah masih terbatas	
Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi	Ketrampilan angkatan kerja terbatas	Belum terbangun Balai Latihan Kerja yang bermutu	
		Tingkat pendidikan angkatan kerja yang terbatas	
	Kesempatan kerja terbatas	Lapangan kerja belum tersedia secara luas	
		Dukungan untuk terciptanya wirausaha baru masih sangat terbatas	
Kualitas dan produktifitas angkatan kerja masih perlu ditingkatkan		Penyelenggaraan pelatihan kerja masih sangat minim	
Masih tingginya angka kemiskinan	Belum Optimalnya Pelayanan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.	Data PMKS masih belum valid dan terupdate	
		Alokasi anggaran daerah untuk pelayanan PMKS masih sangat terbatas	
	Belum optimalnya peran	Kebijakan yang <i>pro poor</i> masih	

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	belum terinternalisasi secara kelembagaan pada berbagai stakeholder (CSR, NGO, dll)

Sumber : Hasil Analisa

## **2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan**

Penyumbang PDRB terbesar di Kota Bima masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan menyumbang 23,71% dalam struktur PDRB Kota Bima tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan .

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, rendahnya kunjungan wisata ke Kota Bima, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor perdagangan, belum optimalnya hasil produksi pertanian, maupun kelautan dan perikanan, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Masalah industri tenun yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga maupun kualitas benang sebagai bahan baku menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan adanya produksi batik cetak dengan menggunakan motif khas Bima juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam mengembangkan maupun memasarkan produk tenun tradisional. Persaingan dengan daerah lain yang juga memiliki produk tenun maupun batik sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha kerajinan tenun di Kota Bima. Disisi lain, kelembagaan sentra dan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan

ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk pertanian merupakan produk unggulan terutama dengan pertanian tanaman pangan. Namun demikian produksinya cenderung terus mengalami penurunan karena luas areal pertanian yang semakin hari semakin berkurang. Produk perikanan juga merupakan produk unggulan. Namun demikian produksi perikanan tangkap menjadi kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Even-even budaya kalau dikemas dan dipertunjukkan secara rutin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini kemudian akan menarik kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang juga akan memajukan ekonomi Kota Bima. Destinasi wisata belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Penciptaan identitas dan ciri khas sebuah obyek wisata juga belum dilakukan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 1.17.**  
**Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan Industri rendah	Melambatnya pertumbuhan industri tenun tradisional	Keterbatasan bahan baku
		Tingginya ongkos produksi
		Kurangnya pembinaan pada pengrajin
		Kurangnya media promosi dan pemasaran produk
		Masih rendahnya kualitas produk (luntur dan panas)

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil masih sangat terbatas	Akses permodalan dan teknologi yang terbatas
	Potensi industri kreatif belum dikembangkan secara optimal	Pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan industri kreatif belum optimal
	PMDN dan PMA masih rendah	Belum optimalnya iklim penanaman modal
Rendahnya kunjungan wisata	Rendahnya daya saing obyek wisata	Obyek wisata belum ditata secara baik
		Akses menuju obyek wisata belum seluruhnya baik
		Kebersihan lingkungan obyek wisata masih kurang
		Sarana dan prasarana obyek wisata masih sangat minim
	Rendahnya upaya promosi pariwisata	Keamanan dan ketertiban
Rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM	Jumlah koperasi aktif masih sangat kurang	Masih kurangnya kerjasama pengembangan pariwisata
		Festival dan atraksi pendukung pariwisata masih kurang
	Fasilitas akses permodalan ke lembaga keuangan bagi UMKM masih sangat terbatas	Pembinaan terhadap koperasi masih minim
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan ekonomi kreatif	Masyarakat masih kurang melek teknologi	Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal
		Produktifitas UMKM masih rendah
Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan	Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi
		Kapasitas produksi dan produktifitas masih rendah
		Kualitas produksi masih terbatas
Menurunnya hasil produksi pertanian	Lahan pertanian semakin berkurang	penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha masih terbatas
	Masih belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun
Belum optimalnya hasil produksi kelautan dan perikanan	Produk perikanan dan pengolahan ikan kurang berdaya saing	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan industri hasil pertanian masih terbatas
		Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI
		Masih rendahnya budidaya perikanan

Sumber : Hasil Analisa

### **3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lingkungan pemerintahan, maka-maka prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih kurangnya kualitas perencanaan kinerja, masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya tingkat kematangan SPIP, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik.

Pada aspek perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan kinerja, meskipun telah termasuk dalam 14 Kota Nominasi untuk memperoleh anugerah bidang perencanaan yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah, namun Kota Bima masih dihadapkan pada persoalan penyajian RKPD yang belum mencantumkan secara lengkap rincian kegiatan dari setiap program pembangunan pada setiap urusan. Disamping itu juga masih terbatasnya inovasi dan terobosan program maupun kegiatan dalam melakukan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima sampai dengan saat ini meskipun sudah berada pada kategori Baik namun nilainya masih terbatas. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa salah satu kelemahan yang menjadi penyebab rendahnya nilai akuntabilitas Kota Bima adalah belum optimalnya penyusunan penjabaran *cascading* kinerja untuk setiap tingkatan jabatan. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; *Specific, Measureable, Attainable, Relevant* dan *Timely*.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kota Bima terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bima mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good* dan *clean government* dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dari sisi efektifitas pengawasan dan pengendalian internal, masih ditemukan belum optimalnya tingkat kematangan SPIP, yang salah satunya disebabkan oleh kompetensi dan kapabilitas APIP belum seluruhnya baik. Keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk transparansi juga masih perlu ditingkatkan. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 1.18.**  
**Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan kinerja masih kurang optimal	Hasil kajian dan litbang masih sangat minim sebagai masukan perumusan kebijakan dan rencana pembangunan	Alokasi anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan masih sangat terbatas
		Jabatan fungsional peneliti belum ada
	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan	Perda Perencanaan dan penganggaran belum tersedia
		Penganggaran belum didukung oleh SOP yang memadai
		Cascading perencanaan kinerja belum sepenuhnya diakomodir dalam penganggaran
		Sumberdaya manusia perencanaan pada setiap unit kerja masih terbatas
Masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah	Data kinerja belum terbangun dengan baik
		Sistem monev pada setiap tingkatan belum berjalan optimal
		Kurang tersedianya SDM monev dan pelaporan yang berkompeten
Belum optimalnya SPIP	Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas APIP	Jumlah auditor terlatih masih terbatas
		Implementasi SPIP mandiri pada setiap unit kerja belum optimal
		Banyak koperasi yang gak aktif
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal	Masih terdapat kode rekening ganda
		Sumber-sumber PAD potensial belum dikelola secara optimal
	PAD masih rendah	Pengelolaan PAD belum dilakukan online
Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Transparansi melalui keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan	Peran PPID belum optimal
		Website OPD maupun Kota belum dikelola secara optimal

Sumber : Hasil Analisa

#### **4. Belum optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Genangan air atau banjir disebabkan karena elevasi/ kemiringan lahan Kota Bima masih cukup luas. Genangan juga disebabkan oleh proses sedimentasi sungai dan saluran drainase yang relatif tinggi, baik pada saluran primer, sekunder, ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kota Bima memiliki ketergantungan dari PDAM Kabupaten Bima yang saat ini sedang mengalami krisis manajemen. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik PAMSIMAS dan Swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya peningkatan kualitas air sungai dan penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kota. Perambahan lahan perbukitan untuk menjadi area tanam jagung juga menimbulkan ancaman serius terhadap potensi bencana banjir dan longsor maupun penurunan daya dukung lingkungan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 1.19.**  
**Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Belum optimalnya penanganan banjir	Sarana dan prasarana penanganan banjir masih terbatas
		Sistem saluran belum terintegrasi dengan baik
	Cakupan pelayanan sampah belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah
		Tatalaksana pengelolaan sampah belum terpadu
		Sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih kurang
	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	Belum adanya PDAM yang berfungsi dengan baik
Rendahnya kualitas perumahan	Rendahnya pendapatan masyarakat (kemiskinan)	
	Banyaknya rumah terdampak banjir	
Keterbatasan cakupan pelayanan air limbah permukiman	Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah masih terbatas	
	Ketersediaan lahan untuk pengolahan air limbah terbatas	
Belum optimalnya kemantapan jalan yang dapat melayani warga	Jaringan jalan kota dalam kondisi baik belum optimal	Banyak jaringan jalan terdampak banjir dan bencana
		Banyak jaringan jalan yang baru dibuka belum ditetapkan dengan keputusan Walikota
Belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif	Masih terbatasnya sarana dan prasarana ruang publik	Keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana ruang publik
Belum optimalnya penataan kawasan strategis	Belum optimalnya penataan fasilitas publik pada kawasan strategis	Belum adanya Perda RDTR kawasan strategis
		Keterliban masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang masih sangat kurang
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Belum adanya Perda RDTR
Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Rendahnya kualitas air sungai, tanah dan udara	Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum optimal
	Terbatasnya ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau publik masih kurang dari 20%
	Alih fungsi lahan	Belum adanya regulasi terkait

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	perbukitan untuk areal jagung secara massif	dengan budidaya jagung Kurangnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan petani

Sumber : Hasil Analisa

Disamping permasalahan pokok tersebut, juga diidentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.20.**  
**Rumusan Permasalahan Pembangunan pada tiap Urusan**

Urusan	Permasalahan Pembangunan
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
Pendidikan	Terdapat kelompok umur diluar usia sekolah masih dan/atau telah bersekolah
	Tidak semua siswa mengikuti ujian
	Ada siswa yang drop out
	Tidak ada biaya (Kemiskinan)
	Belum optimalnya pengelolaan PAUD
	Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan
	Belum semua guru tersertifikasi
	Terdapat beberapa sekolah yang perlu diperbaiki kondisinya
	Masih ada warga buta aksara
Kesehatan	Angka kematian Ibu masih tinggi
	Kasus kematian balita masih tinggi
	Masyarakat belum sepenuhnya mau diimunisasi
	Kasus kematian bayi masih tinggi
	Asupan gizi kurang
	Sebaran tenaga medis belum merata
	Sebaran dokter umum belum merata di seluruh wilayah
	Belum ada rumah sakit berstandar
	Angka TB masih cukup tinggi
	Seharusnya bebas malaria
	Masyarakat miskin belum seluruhnya memiliki kartu BPJS kesehatan

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	Penyandang HIV terus mengalami peningkatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik belum mencapai 100%
	Masih terdapat jalan yang dalam kondisi sedang dan rusak
	Belum semua jalan memiliki drainase dan trotoar
	Terdapat lingkungan permukiman yang hanya memiliki akses gang
	Banyak saluran drainase yang tersumbat
	Luas daerah genangan masih tinggi
	Keterbatasan sumber air baku
	Penduduk belum seluruhnya terlayani oleh air minum layak
	Belum semua rumah tangga bersanitasi baik
	Luas RTH/RTP Masih belum memenuhi 20%
	Banyak bangunan belum memiliki IMB
	Terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan
	Banyak bangunan rumah pada melewati garis sempadan sungai
	Kesenjangan pembangunan infrastruktur pada wilayah timur dan barat
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam jumlah yang banyak
	Masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah
	Luas kawasan kumuh masih cukup luas
	Penanganan rumah korban bencana banjir belum selesai
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Angka kriminalitas cenderung meningkat terutama penyalahgunaan Narkoba
	LSM dan Ormas yang terdaftar sedikit tapi yang beraktifitas cukup banyak
	Lambatnya pelayanan bencana kebakaran
	Penegakan Perda belum berjalan optimal ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana belum optimal
	Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang
Sosial	Belum seluruh PMKS tertangani
	Jaminan sosial masih terbatas
	pelayanan dan perlindungan sosial pada saat bencana masih kurang
	Kurangnya peran pemda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	

Urusan	Permasalahan Pembangunan
Tenaga Kerja	Belum semua pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
	Penyelenggaraan pelatihan masih terbatas
	Angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kurangnya usaha pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik bagi perempuan/ibu rumah tangga
	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu masih terbatas
	Tidak semua korban kekerasan melaporkan ke APH
Pangan	skor pola pangan harapan belum optimal
Pertanahan	Masih banyak lahan pemerintah yang belum memiliki sertifikat
Lingkungan Hidup	Luas RTH Publik kurang dari 15%
	Ketersediaan pemakaman umum terbatas
	Menurunnya kualitas dan kuantitas air
	terjadi pencemaran tanah
	terjadi polusi udara
	penanganan DAS masih rendah
	Terjadi kerusakan lahan dan mata air
	Penanganan sampah masih 40%
	Pengurangan sampah melalui 3R masih 2%
	Lahan untuk TPS/kontainer belum tersedia
	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan masih rendah
	Pemutakhiran data kependudukan (lahir, mati dan migrasi)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan
	Fungsi dan peran RT/RW/LPM masih rendah
	Penataan dan pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan belum optimal
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka partisipasi KB masih rendah
	Pengembangan dan advokasi KIE belum optimal
	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi belum merata
Perhubungan	Terdapat angkutan umum yang tidak melakukan uji kir
	Jaringan jalan yang dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas masih terbatas

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	Pelayanan Parkir dan terminal belum optimal
	Pengawasan dan pengendalian kendaraan umum masih rendah
	Pengelolaan transportasi laut belum optimal
Komunikasi dan Informatika	Belum terbentuk kelompok/ kampung media di setiap kecamatan
	Keterbukaan informasi publik masih terbatas
	Belum semua wilayah terlayani telekomunikasi
	Pemanfaatan IT masih rendah
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Akses modal UMKM yang terbatas
	Banyak koperasi yang tidak aktif
	Banyak koperasi yang aktif tetapi tidak sehat
Penanaman Modal	Terbatasnya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
Kepemudaan dan Olah Raga	Minimnya organisasi pemuda yang aktif
	Masih kurangnya wirausaha muda
	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini
Statistik	Kuantitas dan kualitas data sektoral masih rendah
	Kualitas SDM aparatur statistik masih terbatas
Persandian	Pemahaman terhadap peran dan fungsi persandian masih terbatas
Kebudayaan	Degradasi nilai-nilai kebudayaan lokal
	Kurangnya upaya pelestarian cagar budaya
	Pemahaman dan Implementasi nilai Maja Labo Dahu sebagai nilai Budaya Lokal yang berlandaskan nilai agama semakin dilupakan
	peran petugas dan lembaga keagamaan masih terbatas pada pengajaran tetapi belum optimal dalam mendidik dan membangun akhlak umat
	Belum tersedianya Islamic Center
Perpustakaan	Kurangnya minat baca masyarakat
	Koleksi buku bacaan yang terbatas
	Tidak representatifnya gedung perpustakaan
Kearsipan	Belum tertibnya penataan kearsipan
<b>Urusan Pilihan</b>	
Kelautan dan Perikanan	Daya saing produk olahan masih rendah
	Pengembangan perikanan darat masih kurang
	Keterbatasan peralatan tangkap
Pariwisata	Pengembangan destinasi wisata masih

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	kurang
	Promosi kepariwisataan masih kurang
	Sarana dan prasarana belum memadai
	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
Pertanian	Alih fungsi lahan pertanian produktif
	Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal
	Daya saing produk olahan masih rendah
	Belum fokusnya program ternak sapi sebagai produk unggulan daerah
	Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengadopsi ternak masih rendah
Perdagangan	Pengelolaan Pasar belum optimal
	Pengembangan produk unggulan lokal belum optimal
Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil belum memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan
	Pengembangan produk unggulan industri lokal belum optimal
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
Pengawasan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP
	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
	Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material
	Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang
	Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah
Perencanaan Pembangunan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kurang berkualitas
	Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
	Proses perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja
	Masih terjadi pelanggaran terhadap RTRW
Keuangan	Capaian realisasi PAD belum mampu mencapai target
	Penetapan target PAD belum sesuai potensi
	Pengelolaan Aset Daerah belum optimal
	Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
	Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Masih banyak ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan Pembangunan</b>
	Penempatan ASN belum berbasis Merit Sistem
	Disiplin dan kinerja ASN belum terukur dengan baik

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013 - 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028. Oleh karena itu perlu perhatian yang tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam visi misi Walikota/Wakil Walikota Bima yang terpilih. Adapun visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”.

Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut:

- a. Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.
- b. Beriman memiliki makna masyarakat Kota Bima yang selalu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun karakter pelaku pembangunan yang religius. SDM yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kota Bima. Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi

juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif yang religius untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat Kota Bima yang bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

- c. Maju memiliki makna kualitas sumber daya manusia yang baik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kota Bima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Disamping itu, Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima dimasa yang akan datang. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar.
- d. Adil memiliki makna bahwa Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif

masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, pentingnya juga menekankan agar hasil- hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Bima terutama membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah terisolir dan terpencil menjadi lebih terbuka dengan tersedianya infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

- e. Sejahtera memiliki makna masyarakat Kota Bima memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kerawanan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Memperhatikan visi tersebut di atas, serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Bima dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

**Misi Pertama** : “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai- nilai budaya lokal”.

**Misi Kedua** : “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.

**Misi Ketiga** : “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.

**Misi Keempat** : “Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				
							2014	2015	2016	2017	2018
I	Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya local	1. Membentuk karakter manusia yang religious	Jumlah dana ZIS yang disalurkan	4 Miliar	a. Meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan (ZIS) (Rupiah)	750 juta	1.5 M	3 M	4 M	4 M
						Rasio rumah ibadah	2	2.3	2.7	3	3
					b. Meningkatkan kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0
		2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang dikelola dengan baik	50%	c. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan (%)	5	4	3	2	1
II.	Menciptakan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual	3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	74,10	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,20	9.60	9.80	10	10,20
						Rata-rata nilai UN SD	5,50	5,80	6,00	6,50	7,00
						Rata-rata nilai UN SMP	5,50	5,80	6,00	6,50	7,00
					Meningkatnya daya saing	IPM	71,23	72,75	73,27	73,79	74,10
						Persentase penduduk miskin (%)	9,74	9,11	8,53	7,90	7,00
						Pengangguran terbuka (%)	5,74	5,18	4,67	4,22	3,80
						Meningkatnya derajat	Angka Harapan	64,07	64,32	65,27	66,22

					kesehatan masyarakat	Hidup (tahun)					
						Angka Balita Gizi Buruk	0,090	0,085	0,080	0,075	0,00
						Angka kematian ibu melahirkan	150/100.000 KH	120/100.000 KH	100/100.000 KH	80/100.000 KH	75/100.000 KH
III.	Mewujudkan masyarakat yang <b>ADIL</b> melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase penduduk yang memperoleh pelayanan dasar : - air bersih; - sanitasi; - rumah layak huni.	100%	a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses air (%)	75,88	80,83	87,00	92,00	100
						Persentase Rumah Layak Huni (%)	86,00	87,00	88,00	90,00	92,50
						Persentase Rumah Tangga bersanitasi baik (%)	74,67	76,50	80,00	90,00	100
						Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%)	97,37	97,75	98,50	99,20	100
		2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	50,01	55	60,01	63	65
						Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik (%)	65	70	76	78	80
Opini BPK terhadap LKPD	WTP					WTP	WTP	WTP	WTP		
IV.	Menjadikan masyarakat <b>SEJAHTERA</b>	1. Meningkatkan pembangunan	Pertumbuhan	6,50	a.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB (%)	5,50	5,70	5,90	6,20	6,50

berbasis pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial dan politik dan keamanan	ekonomi lokal	ekonomi									
					b. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita (Rp.000.000)	17t	18,50	20	22	25
					c. Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan (ton)	39.000	40.000	42.000	44.000	50.000
	2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan	Persentase kawasan kumuh	5%	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	61,63	67,15	75,00	80,00	85,00	
					Persentase luas permukiman kumuh (%)	9,00	7,00	5,00	3,00	0,00	
					Persentase luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata (%)	2,00	2,71	5,00	10,00	15,50	
	3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Indeks kriminalitas	99%	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas (kasus)	190	187	180	170	150	

Sumber: RPJMD Kota Bima 213-2018

## **2.2. Prioritas Daerah**

Terdapat 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah Kota Bima yang dijadikan arah dalam pengembangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Bima tahun 2018, yakni:

1. Pembangunan Pendidikan;
2. Pembangunan Kesehatan;
3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
4. Ketahanan Pangan;
5. Pembangunan ekonomi;
6. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;
7. Pembangunan Agama
8. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
9. Kesejahteraan Sosial;
10. Penanggulangan Kemiskinan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Penanggulangan Bencana;
13. Ketertiban dan Keamanan.

## **2.4. Indikator Kinerja Utama Kota Bima**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Disamping itu penetapan IKU juga bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Bima untuk penyelenggaraan manajemen kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Kota Bima tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	BPS
		Rata-rata nilai UN SD	Nilai rata-rata Ujian Nasional pada jenjang pendidikan SD tahun ke-n	DINAS DIKBUD
		Rata-rata nilai UN SMP	Nilai rata-rata Ujian Nasional pada jenjang pendidikan SMP tahun ke-n	DINAS DIKBUD
2	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi	BPS
		Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk kategori miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100$	BP
		Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	BPS/DINAS TENAGA KERJA
3	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani}}{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani}}$	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian ibu melahirkan	Jumlah Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	DINAS KESEHATAN
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}}$	DINAS KESEHATAN/DINAS PUPR
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Realisasi rumah layak huni yang ditangani tahun ke - n}}{\text{Target rumah layak huni yang ditangani pada tahun ke - n}}$	DINAS PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi baik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}}$	DINAS PUPR/DINAS KESEHATAN
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	Hasil Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Indeks AKIP s}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Opini BPK terhadap LKPD	Hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	INSPEKTORATDAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	Meningkatnya pelayanan public yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB } t_n - \text{PDRB } t_{n-1}}{\text{PDRB } t_{n-1}} \times 100\%$	BPS/DINAS STATISTIK
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Gambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun $\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n}$	BPS/DINAS STATISTIK
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik/mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		Persentase luas permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas seluruh area permukiman}} \times 100\%$	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata	$\frac{\text{Luas kawasan tepian air yang tertata}}{\text{Luas seluruh target kawasan tepi}} \times 100\%$	DINAS PUPR, DINAS PARIWISATA, DINAS PERUMAHAN DAN KAW. PERMUKIMAN

Indikator Kinerja Utama tersebut tidak mengambil seluruh sasaran strategis yang ada dalam hasil rewiu yang dilakukan terhadap RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengacu kepada hasil dan catatan rekomendasi kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2017 terhadap penajaman idikator kinerja sasaran strategis khususnya terhadap indikator kinerja yang masih bersifat proses dan output. Pemerintah Kota Bima seharusnya melakukan rewiu terhadap dokumen RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018,

Namun demikian, mengingat periode RPJMD Kota Bima tersebut sudah memasuki masa waktu berakhir pada tahun 2018 sehingga tidak dilakukan revaluasi terhadap indikator sasaran strategis RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018. Yang dilakukan kemudian adalah memilah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang masih bersifat proses dan output untuk tidak menjadi IKU Kota Bima pada tahun 2018..

2. Langkah selanjutnya yang diambil adalah memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 seluruhnya berorientasi pada hasil dan menjawab isu-isu strategis yang sedang dan masih akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima selama 5 (lima) tahun mendatang

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari IKU Kota Bima Tahun 2018, Walikota Bima telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,20
		Rata-rata nilai UN	Nilai	7,00
		Rata-rata Nilai UN	Nilai	7,00
2.	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,10
		Persentase penduduk miskin	%	7,00
		Pengangguran terbuka	%	3,80
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	%	0,00
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	75
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	100

		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi baik	%	100
5.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	65,00
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	%	80,00
		Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
6.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	80
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,50
8.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	25
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	85,00
		Persentase luas permukiman kumuh	%	0,00
		Persentase luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata	%	15,50

Sumber: PK Pemerintah Kota Bima 2018

**Tabel 2.4.**

**Program Prioritas Pembangunan**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pelaksana</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.483.154.500,00	DIKBUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.960.682.500,00	DIKBUD
Program Pendidikan Non Formal	188.946.000,00	DIKBUD
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	496.655.000,00	DIKBUD
Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	1.711.529.000,00	DIKBUD
<b>Jumlah</b>	<b>32840967000</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>		
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	130.886.500,00	DINAS PPPA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	372.241.000,00	DINAS PPPA
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	272.043.500,00	DINAS PPPA
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	200.763.000,00	DINAS PPPA

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pelaksana</b>
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	36.450.000,00	DINAS PPPA
Program Pengawasan Obat dan Makanan	65.247.000,00	DIKES
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	11.640.000,00	DIKES
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.596.500,00	DIKES
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	151.031.600,00	DIKES
Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan	2.181.250.000,00	DIKES
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	708.716.000,00	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	550.044.000,00	DINAS SOSIAL
Program pembinaan anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK)	46.990.000,00	DINAS SOSIAL
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	22.865.000,00	DINAS SOSIAL
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	22.996.500,00	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	137.357.000,00	DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	221.703.000,00	DISNAKER
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	257.520.000,00	DISNAKER
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	316.646.000,00	DISNAKER
<b>Jumlah</b>	<b>7.029.986.600,00</b>	<b>6.660.317.440,00</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.542.055.750,00	DIKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.805.006.000,00	DIKES
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	176.762.500,00	DIKES
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	196.538.500,00	DIKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	915.079.250,00	DIKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.115.126.250,00	DIKES
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	9.527.839.420,00	DIKES
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	9.810.072.648,00	DIKES
Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB	152.707.000,00	DIKES
Program Keluarga Berencana	316.359.200,00	DPPKB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	283.710.600,00	DPPKB
Program pelayanan kontrasepsi	1.492.302.000,00	DPPKB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	324.755.000,00	DPPKB

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pelaksana</b>
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	30.767.100,00	DPPKB
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	55.034.700,00	DPPKB
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	13.724.800,00	DPPKB
<b>Jumlah</b>	<b>35.757.840.718,00</b>	<b>33.329.215.836,52</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.170.891.315,90	DINAS PUPR
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.955.919.165,00	DINAS PUPR
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	19.273.906.000,00	DINAS PUPR
Program Perencanaan Tata Ruang	1.258.030.000,00	DINAS PUPR
Program Pengembangan Perumahan	1.821.567.918,00	DINAS PERKIM
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social	1.965.050.000,00	DINAS PERKIM
Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	369.484.000,00	BPBD
Program Kesiapsiagaan	669.222.200,00	BPBD
Program Rekonstruksi	51.807.011.160,00	BPBD
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.585.044.075,10	DINAS PUPR
<b>Jumlah</b>	<b>115.876.125.834</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 5</b>		
Program perencanaan pembangunan daerah	2.133.058.744,00	BAPPEDALITBANG
Program perencanaan pembangunan ekonomi	60.485.000,00	BAPPEDALITBANG
Program perencanaan sosial dan budaya	956.312.989,00	BAPPEDALITBANG
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.238.680.000,00	BAPPEDALITBANG
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	141.290.000,00	BAPPEDALITBANG
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	264.476.250,00	BAPPEDALITBANG
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.297.949.800,00	BPKAD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.585.982.100,00	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	1.300.450.500,00	BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.818.044.200,00	BPKAD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.053.505.000,00	BKPSDM
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	915.287.100,00	BKPSDM
Program Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN	337.184.000,00	BKPSDM
Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	189.994.200,00	BKPSDM
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	533.312.500,00	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.797.400,00	BKPSDM
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	104.950.470,00	INSPEKTORAT

Program Prioritas	Anggaran	Pelaksana
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.960.862.600,00	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	175.025.050,00	INSPEKTORAT
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	28.575.000,00	INSPEKTORAT
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	11.200.000,00	SETDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	186.350.357,00	SETDA+SELURUH OPD
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.213.134.400,00	SETDA
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	858.758.000,00	SETDA
Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	532.143.000,00	SETDA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	283.771.500,00	SELURUH OPD
Jumlah	25.252.580.160,00	23.563.809.588,00
<b>SASARAN STRATEGIS 6</b>		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.968.972.000,00	DISDUKCAPIL
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	4.000.000,00	INSPEKTORAT
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	173.860.000,00	DISKOMINFO
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	150.650.000,00	DISKOMINFO
Program kerjasama informasi dengan mas media	422.166.700,00	DISKOMINFO
Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika	704.660.400,00	DISKOMINFO
Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	46.100.000,00	DISKOMINFO
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	533.063.700,00	DISKOMINFO
Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel	97.400.000,00	DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	165.360.000,00	DISKOMINFO
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	120.050.000,00	DPMPPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	228.425.000,00	DPMPPTSP
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	700.950.000,00	DPMPPTSP
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	485.735.500,00	SETDA
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	3.607.800.000,00	SETDA
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1.974.403.400,00	SETDA
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	176.583.331,00	SETDA
Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	176.583.331,00	SETDA
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	293.180.976,00	SETDA
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	159.708.000,00	SETDA

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pelaksana</b>
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	233.165.000,00	SETDA
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	1.215.353.750,00	SETDA
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	873.776.500,00	SETDA
Jumlah	14.511.947.588	
<b>SASARAN STRATEGIS 7</b>		
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	99.079.600,00	DISKOPERINDAG
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	116.834.300,00	DISKOPERINDAG
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	223.821.800,00	DISKOPERINDAG
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.027.380.150,00	DISPAR
Program pengembangan destinasi pariwisata	1.760.594.000,00	DISPAR
Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	84.483.000,00	DISPAR
Program pengembangan budidaya perikanan	819.614.700,00	DISKANLUT
Program pengembangan perikanan tangkap	1.448.507.500,00	DISKANLUT
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	312.610.000,00	DISTAN
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	355.981.000,00	DISTAN
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.033.333.500,00	DISTAN
Program peningkatan produksi hasil peternakan	236.845.000,00	DISTAN
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	411.180.500,00	DISKOPERINDAG
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.786.609.000,00	DISKOPERINDAG
Jumlah	10.716.874.050,00	
<b>SASARAN STRATEGIS 8</b>		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	384.328.000,00	DISTAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6.474.552.000,00	DISTAN
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	794.213.650,00	DISLUTKAN
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	62.500.000,00	DISLUTKAN
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	133.080.000,00	DISTAN
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	165.033.121,00	DISTAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah	124.000.379,00	DISKOPERINDAG
Program peningkatan kemampuan teknologi industry	92.072.400,00	DISKOPERINDAG
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	2.138.196.100,00	DISKOPERINDAG
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	235.026.850,00	DISPAR
Program Pengembangan SDM Kepariwisata	9.699.650,00	DISPAR
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	252.569.700,00	DISKOPERINDAG

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pelaksana</b>
Jumlah	10.865.271.850,00	9.623.855.041,46
<b>SASARAN STRATEGIS 9</b>		
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	57.813.770.408,37	DINAS PUPR
Program pembangunan jalan dan jembatan	24.425.053.090,75	DINAS PUPR
Program pembangunan turap/talud/bronjong	5.346.745.707,60	DINAS PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	5.372.472.022,00	DINAS PUPR
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	359.450.000,00	DINAS PUPR
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	620.920.000,00	DINAS PUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4.691.312.425,00	DINAS PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.170.891.315,90	DINAS PUPR
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.955.919.165,00	DINAS PUPR
Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	9.464.703.165,10	DINAS PUPR
Program Perencanaan Permukiman Kumuh	65.500.000,00	DINAS PERKIM
Program Pengembangan Kawasan	295.740.000,00	DINAS PERKIM
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	99.100.000,00	DISHUB
Program peningkatan pelayanan angkutan	664.500.000,00	DISHUB
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	901.925.000,00	DISHUB
Jumlah	144.248.002.299,72	

Sumber: PK Pemerintah Kota Bima 2018

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sebuah sistem akuntabilitas secara periodik. Sistem tersebut membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2018. yang diturunkan dari perencanaan jangka menengah (RPJMD) serta dari rencana kinerja tahunan Kota Bima Tahun 2018.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1.**

**Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Nilai</b>	<b>Kategori</b>
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bima

Dalam rangka memberikan gambaran tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018 maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan misi dan visi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai selama masa periode lima tahun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Berikut tabel capaian kinerja Tujuan Kota Bima tahun 2018.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bima**

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Membentuk karakter masyarakat yang religious	Dana ZIS yang disalurkan	Rp. 4.000.000.000	Rp. 4.877.460.717	121,94%
2	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya local	Persentase nilai budaya yang lestari	50%	95%	190%
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IPM	74,10	74,31	100,28%
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase penduduk yang memperoleh pelayanan dasar (air bersih, sanitasi dan rumah layak huni)	100%	91,11%	91,11%
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	B (65,01)	B(63,64)	97,89%
6	Meningkatkan pembangunan ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi	6,5%	6,76%	104%
7	Meningkatkan	Luas	93%	82,97%	89,22%

	infrastruktur perkotaan	kawasan layak huni			
8	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Indeks kriminalitas	99%	99%	100%

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 8 (delapan) tujuan RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018, terdapat empat tujuan yang berhasil melampaui target yaitu Membentuk karakter masyarakat yang religius, Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dengan tingkat capaian lebih dari 100%. Sedangkan satu tujuan Meningkatkan keamanan dan ketertiban tingkat realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan 3 (tiga) tujuan yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Meningkatkan infrastruktur perkotaan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian tingkat capaian kinerja untuk kedelapan tujuan tersebut masuk dalam kategori BERHASIL tercapai karena berada pada skala ordinal lebih dari 85.

Adapun kendala atau permasalahan tidak tercapainya target dari 2(dua) tujuan Meningkatkan pemerataan pembangunan dan Meningkatkan infrastruktur perkotaan RPJMD tersebut adalah dipengaruhi oleh dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir tahun 2016 yang lalu sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Bima selama 2 (dua) tahun terakhir difokuskan pada percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan kendala belum tercapainya target tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan lebih disebabkan oleh belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik maupun akuntabilitas kinerja dalam bentuk penyajian berbagai dokumen SAKIP. Oleh karena itu, aspek-aspek yang belum mencapai target harus lebih menjadi fokus untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya dimasa yang akan datang.

### **3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Penyajian capaian kinerja Pemerintah Kota Bima, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2018, membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, membandingkan dengan target akhir tahun perencanaan RPJMD, membandingkan dengan kondisi dan standar nasional serta dengan melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disertai alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut, didukung oleh sejumlah program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

### **1. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan**

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan ini dioperasionalkan melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu angka rata-rata lama sekolah, rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk SD dan SMP. Adapun pencapaian masing-masing indikator tersebut dideskripsikan secara lebih terperinci sebagaimana pembahasan berikut.

#### **a. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Data Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2018 merupakan data capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima untuk tahun 2017. Ini berarti bahwa data capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bima untuk tahun 2018 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan *direlease* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Menurut data BPS tahun 2018, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima hingga tahun 2017 adalah 10,14 tahun.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bima**  
**Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata Lama Sekolah	10,20	10,14	99,41

Sumber: Hasil perhitungan

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus meningkat selama kurun empat tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut,

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Tahun Capaian Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	% Capaian
Tahun 2014	9,20	9,46	102,82
Tahun 2015	9,60	9,58	99,79
Tahun 2016	9,80	9,96	101,63
Tahun 2017	10	10,13	101,3
Tahun 2018	10,20	10,14	99,41

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2018

Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir periode perencanaan tahun 2018 **belum mencapai target** yang diharapkan yaitu sebesar 10,20 tahun.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (2018)	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	
Rata-rata Lama Sekolah	10,20	9,46	9,58	9,96	10,13	10,14	99,41%

Sumber: Hasil perhitungan

Adapun perbandingan rata-rata lama sekolah di Kota Bima terhadap kondisi Nasional menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bima lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan rata-rata lama sekolah rata-rata nasional yaitu hanya sebesar 8,42 tahun atau lebih tinggi 1,72 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bima yang terus meningkat pada setiap tahun didukung oleh :

- makin membaiknya sarana-sarana pendidikan
- dukungan beasiswa
- biaya operasional sekolah (BOS)
- serta makin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pemerintah Kota Bima terus berupaya melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta adanya penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

b. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Ujian Nasional (UN) yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya digunakan sebagai: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima menyebutkan bahwa rata-rata nilai UN untuk SD yang diselenggarakan pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 7,22 target sebesar 7 atau dengan tingkat capaian 103,14%. Sedangkan nilai rata-rata UN untuk tingkat SMP hanya sebesar 3,66 dari target 7 atau dengan tingkat capaian 52,29 . Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2018 sebesar 5,44 atau dengan capaian 77,71%. Adapun perbandingan realisasi kinerja terhadap target 2018

untuk indikator rata-rata nilai UN sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional**  
**di Kota Bima Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Nilai UN SD	7	7,22	103,14
Nilai UN SMP	7	3,66	52,29
<b>Rata-rata Nilai UN</b>	<b>7</b>	<b>5,44</b>	<b>77,71</b>

Sumber: Hasil perhitungan

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2018 mengalami fluktuasi dimana selama kurun waktu tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Adapun perbandingan capaian kinerja indikator rata-rata nilai UN tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional**  
**Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
SD/MI/Paket A	5,60	6,89	7,25	7,22
SMP/MTs/Paket B	<b>5,71</b>	<b>3,75</b>	<b>4,70</b>	<b>3,66</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>5,66</b>	<b>5,32</b>	<b>5,98</b>	<b>5,44</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2019

Salah satu faktor penyebab masih rendahnya rata-rata nilai UN dikarenakan oleh adanya soal dengan daya nalar tinggi/*higher order thinking skills*. Bahkan penurunan yang sangat parah terjadi pada tingkat SMP. Hal ini tidak saja terjadi di Kota Bima tapi rata-rata di seluruh Indonesia. Mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhajir Effendi bahwa penurunan nilai UN juga dipengaruhi semakin tingginya integritas. Namun demikian secara lebih spesifik bahwa soal-soal

dengan daya nalar tinggi itu merupakan hal baru buat guru-guru di Kota Bima sehingga perlu peningkatan kompetensi guru sehingga dalam proses pembelajaran juga sudah diperkenalkan soal-soal dengan daya nalar tinggi.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator rata-rata nilai UN sampai tahun 2018 terhadap target jangka menengah dalam RPJMD sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rata-rata Nilai UN Sekolah Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (2018)	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	
Rata-rata Nilai UN	7,00	NA	5,66	5,32	5,98	5,44	77,71%

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan data pada tabel 3.8 tersebut diatas menunjukkan bahwa target RPJMD untuk indikator rata-rata Nilai UN SD dan SMP belum tercapai. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kota Bima untuk tahun-tahun berikutnya.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya mutu pendidikan, antara lain :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Selain itu, terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya manusia, maka dapat disebutkan bahwa sumberdaya manusia yang tersedia baik tenaga struktural maupun fungsional yang merupakan stakeholder pendidikan telah dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka

pencapaian sasaran strategis 1 ini meskipun target 2 (dua) indikator kinerjanya belum tercapai sesuai yang diharapkan.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dapat diukur dari indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diukur dari indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi hidup layak diukur dari nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun pada tahun 2017, dimensi pengetahuan sedikit mengalami perubahan khususnya Angka melek huruf berubah menjadi harapan rata-rata lama sekolah.

Data IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2018 merupakan data capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2017. Berdasarkan data, capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2017 mencapai 74,31 dari target sebesar 74,10 atau dengan tingkat capaian sebesar 100,28%.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	74,10	74,31	100,28

Sumber: Hasil perhitungan

Angka IPM ini apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kota Bima mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu

dari 71,21 pada tahun 2014 menjadi 74,31 pada tahun 2018. Kenaikan IPM Kota Bima selama 2013-2018,

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target (Tahun)</b>	<b>Realisasi (Tahun)</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	71,23	71,14	99,87
Tahun 2015	72,75	72,23	99,29
Tahun 2016	73,27	72,99	99,61
Tahun 2017	<b>73,79</b>	73,67	99,84
Tahun 2018	74,10	74,31	100,28

*Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2018*

Peningkatan IPM dan komponen-komponennya selama periode 2014-2018, mencerminkan adanya suatu progres yang berarti dalam peningkatan pembangunan kualitas manusia. Walaupun demikian, bukan berarti pembangunan di Kota Bima telah maksimal. Dari tiga komponen penyusun IPM, terutama pada komponen PPP, Kota Bima masih sangat tertinggal, walaupun dari sudut kesehatan maupun pendidikan sudah memperoleh hasil yang cukup membanggakan.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima tahun 2018 terhadap target jangka menengah RPJMD adalah bahwa angka IPM Kota Bima sejak tahun 2017 telah melewati target jangka menengah RPJMD dimana target jangka menengah RPJMD pada tahun 2018 adalah sebesar 74,10 dan sudah mencapai angka 74,31 pada tahun 2017 atau dengan tingkat capaian sebesar dengan tingkat capaian sebesar 100,28% sebagai mana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan manusia**  
**Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (2018)	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	
IPM	74,10	71,14	72,23	72,99	73,67	74,31	100,28%

Sumber: Hasil perhitungan

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan propinsi NTB, maka nilai IPM Kota Bima pada tahun 2017 lebih tinggi dari angka IPM nasional dan Propinsi NTB. Tingginya nilai IPM Kota Bima didukung oleh tingginya nilai komponen pembentuk IPM. Untuk mendukung pencapaian IPM tersebut Pemerintah Kota Bima melakukan peningkatan kualitas program pada Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini sehingga melampaui target yang ditetapkan.

b. Persentase Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2018 mengalami penurunan, dimana sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS bahwa data persentase penduduk miskin tahun terakhir adalah sebesar 8,79% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% atau tercapai sebesar 79,64%.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Bima**  
**Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penduduk Miskin	7,00	8,79	79,64

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan data tersebut dalam tabel 3.12, bahwa target untuk indikator kinerja persentase Penduduk Miskin di Kota Bima pada tahun 2018 belum mampu dicapai dengan selisih 1,79%.

Selanjutnya apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bima bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2018 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 9,74%. Secara rinci perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target (Tahun)</b>	<b>Realisasi (Tahun)</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	9,74	9,74	100
Tahun 2015	9,11	9,85	92,49
Tahun 2016	8,53	9,51	89,70
Tahun 2017	<b>7,90</b>	<b>9,27</b>	<b>85,22</b>
Tahun 2018	7,00	8,79	79,64

*Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2018*

Melihat trend penurunan angka kemiskinan Kota Bima selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan, bahwa cenderung terjadi perlambatan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semakin rendah angka kemiskinan di suatu daerah, maka akan semakin sulit upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan karena semakin terincinya aspek-aspek dalam indikator kemiskinan yang harus ditangani dalam program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 3.14**  
**Data Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima tahun 2014-2018**

<b>Kota Bima</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penduduk Miskin (jiwa)	15.312	15.700	15.420	15.145	14.800
Tingkat Kemiskinan (%)	9,74	9,85	9,51	9,27	8,79

Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator persentase penduduk miskin di Kota Bima Tahun 2018 terhadap target jangka menengah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (2018)	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian
		2014	2015	2016	2017	2018	
Persentase penduduk miskin	7,00	9,74	9,85	9,51	9,27	8,79	79,64%

Sumber: Hasil perhitungan

Mencermati data pada tabel 3.15 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa target RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018 belum tercapai. Oleh karena itu, pada periode RPJMD berikutnya program-program penanggulangan kemiskinan perlu lebih untuk diterus tingkatkan.

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bima diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut : pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas rumah, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air bersih, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan pemenuhan hak rasa aman.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima APBD Kota Bima Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran persentase pengurangan penduduk miskin, antara lain :

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- d. Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM
- e. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan

Disamping kontribusi dari program pembangunan pada urusan social, penurunan angka kemiskinan ini juga didukung oleh capaian pada berbagai sector seperti:

- Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Sanitasi
- Sektor Pekerjaan Umum
- Sektor Perdagangan dan Jasa
- Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Sektor Informasi dan Komunikasi
- Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
- Sektor Real Estat, Perumahan dan permukiman
- Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Sektor Pendidikan
- Sektor Kesehatan

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) belum dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

c. Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi NTB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa merupakan data pengangguran terbuka Kota Bima pada tahun 2018 menunjukkan keberhasilan kinerja dimana angka pengangguran terbuka Kota Bima adalah 2,39% dari target 3,80% atau dengan capaian 159%.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Angka pengangguran terbuka	3,80	2,39	159

Sumber: Hasil perhitungan

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target sasaran tersebut tergambar dari jumlah penduduk yang bekerja dan tidak bekerja di Kota Bima sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.17**  
**Jumlah Angkatan Kerja Kota Bima tahun 2018**

No.	JENIS KEGIATAN		Jumlah (jiwa)
	Bekerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)	
1	85,455	2,089	87.544

Sumber: BPS Kota Bima 2019

Capaian kinerja indikator pengangguran terbuka ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 angka pengangguran terbuka sebesar 8,69%, kemudian pada tahun 2015 naik lagi menjadi 10,15 persen, dan ditahun 2016 sebesar 8,89%.

Gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun empat tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Indikator Kinerja Angka Pengangguran Terbuka di Kota Bima pada Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya**

Kota Bima	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Pengangguran Terbuka (%)	8,69	10,15	8,89	3,51	2,39

Sumber: BPS Kota Bima

Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator Angka pengangguran terbuka di Kota Bima Tahun 2018 terhadap target jangka menengah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Pengangguran terbuka Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian (%)
	RPJMD (2018)	2014	2015	2016	2017	2018	
Angak Pengangguran Terbuka	3,80	8,69	10,15	8,89	3,51	2,39	159

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja angka pengangguran terbuka telah mencapai target jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 sebesar 3,80% telah dapat dilampaui sejak tahun 2017 dengan angka capaian 3,51%, dan pada tahun 2018 lebih baik lagi capaian yaitu sebesar 2,39%. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator angka pengangguran terbuka pada tahun 2018 terhadap target jangka menengah RPJMD adalah sebesar 159%.

Pencapaian kinerja tersebut disamping didukung langsung oleh program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, juga didukung oleh pencapaian dari sektor usaha lainnya :

- Sektor Pertanian dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- Sektor Konstruksi
- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Sektor Informasi dan Komunikasi
- Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
- Sektor Real Estat
- Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Sektor Jasa Pendidikan
- Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Sektor Jasa Lainnya

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Angka balita gizi buruk

Angka balita gizi buruk pada tahun 2018 ditargetkan 0,0 sesuai dengan target RPJMD Kota Bima 2013-2018. Target ini memang Nampak ambisius, namun itu menjadi komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menangani kasus-kasus gizi buruk dan stunting yang sekarang nampak sangat berpengaruh terhadap kualitas setiap individu masyarakat. Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa an gizi buruk pada tahun 2018 adalah 0,003 dari target 0,0.

**Tabel 3.20**  
**Realisasi Kinerja Indikator Angka balita Gizi Buruk di Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Balita Gizi Buruk	0,00	0,003	<b>97,00</b>

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan data tersebut, maka capaian indikator kinerja angka balita gizi buruk pada tahun 2018 telah melebihi target yang diharapkan. Namun demikian, apabila ditinjau dari jumlah kasus balita gizi buruk,

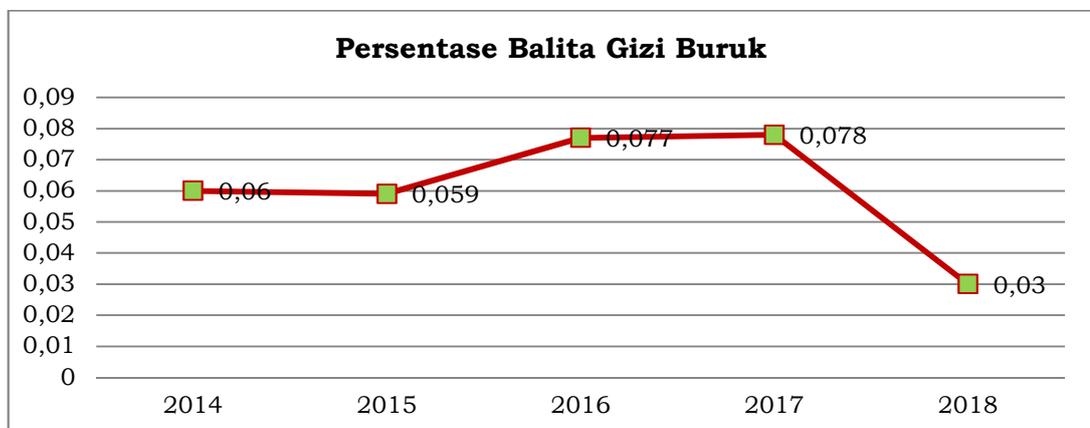
pada tahun 2018 terjadi sebanyak 4 kasus, jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebanyak 13 kasus gizi buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka angka balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,077 % dari target 0,080%, dan pada tahun 2017 sebesar 0,078% dari target 0,075. Adapun Persentase balita gizi buruk di Kota Bima Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka balita Gizi Buruk di Kota Bima Tahun 2018 dengan Tahun-tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Angka Balita Gizi Buruk</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Tahun 2015	0,085 %	0,059 %	144,07
Tahun 2016	0,080 %	0,077 %	103,90
Tahun 2017	0,075 %	0,078 %	96,15
Tahun 2018	0,0 %	0,003 %	97,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD, maka capaian kinerja indikator angka balita gizi buruk pada tahun 2018 adalah belum berhasil dicapai sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (2018)	Kinerja Sampai Tahun 2018					Capaian (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
Angka Balita Gizi Buruk	0,00	0,06	0,059	0,077	0,078	0,003	97,00

Sumber: Hasil perhitungan

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu factor kesehatan diri dan factor lingkungan. Faktor kesehatan diri berkaitan erat dengan asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja Angka Balita Gizi Buruk adalah meliputi:

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  2. Program Upaya kesehatan masyarakat
- b. Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu (*Martenal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Angka kematian ibu (maternal) di Kota Bima pada tahun 2018 sebanyak 122/100.000 KH dari target 75/100.000 KH.

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Kinerja Indikator Angka kematian ibu melahirkan**  
**Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)	75	122	<b>61,48</b>

Sumber: Hasil perhitungan

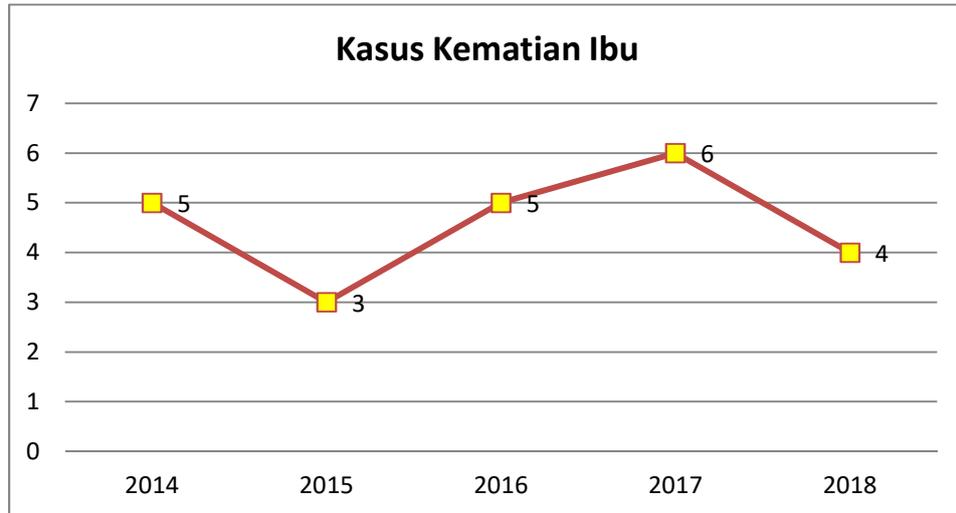
Capaian kinerja untuk indikator angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2018 belum mampu mencapai target, bahkan dengan tingkat capaian kinerja yang cukup rendah yaitu 61,48%.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka kematian ibu melahirkan**  
**Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kematian ibu melahirkan	2015	120/100.000	87/100.000	137,93
	2016	100/100.000	148/100.000	67,57
	2017	80/100.000	188/100.000	42,55
	2018	75/100.000	122/100.000	61,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018



Dari gambar di atas diketahui bahwa jumlah kasus kematian ibu di Kota Bima mengalami fluktuatif. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai. Hasil kajian audit didapatkan penyebab kematian ibu sebesar 50% karena tidak terdeteksinya komplikasi pada ibu hamil yang disebabkan oleh status sosial ibu seperti hamil diluar nikah, istri siri dan single parent. penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan pemanfaatan jampersal tanpa memandang status sosial. Serta dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Koordinasi, Validasi dan Sinkronisasi Data ANC Terpadu - Pertemuan Refresing APN - Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun - DRK (Diskusi Refleksi Kasus) Tk. Kota Bima - Pengadaan Buku-buku Register KIA - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Puskesmas - Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Puskesmas PKPR.

Adapun program yang dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di Kota Bima antara lain meliputi:

1. Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB
2. Program pengadaan, peningkatan dan perbikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

#### **4. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar**

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar, terdapat beberapa indikator utama yang diukur tingkat capaian kinerja seperti berikut ini.

##### **a. Indikator Persentase rumah tangga berakses air bersih**

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air bersih.

Pada tahun 2018, tingkat pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga berakses air bersih ditargetkan bahwa seluruh masyarakat Kota Bima sudah terlayani air bersih layak atau dengan target 100% dan terealisasi sebesar 96,21% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.25**  
**Realisasi Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih**  
**Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	100%	96,21%	<b>96,21</b>

Sumber: Hasil perhitungan

Pada tahun 2018 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang diwujudkan melalui “Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah” dengan kegiatan “Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah” sebanyak 1.167 rumah tangga (4.679 jiwa) atau 2,81%. Capaian kinerja ditahun 2018 ditargetkan 38.414 rumah tangga (154.010 jiwa) dan terealisasi 36.957 rumah tangga (148.169 jiwa) atau sebesar 96,21%. Dengan demikian target kinerja tahun 2018 belum mampu tercapai. Tidak berhasilnya pencapaian target indikator kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) laju pertumbuhan penduduk/rumah tangga lebih cepat dari yang ditargetkan (38.414 jumlah rumah tangga yang ditargetkan, 41.506 Rumah tangga yang terealisasi).
- b) Focus penanganan pada tahun 2018 adalah rehab rekon pasca banjir akhir tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pelayanan penyediaan air minum layak bagi masyarakat Kota Bima. Secara jelas perbandingan capaian kinerja indikator persentase rumah tangga berakses air bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kota Bima Tahun 2018 dengan Tahun-tahun sebelumnya**

<b>Indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Tahun 2014	75,88%	88,18%	116,21
Tahun 2015	<b>80,83%</b>	<b>91,17%</b>	112,79
Tahun 2016	<b>87,00%</b>	<b>92,07%</b>	105,83
Tahun 2017	<b>92,00%</b>	<b>93,25%</b>	101,36
<b>Tahun 2018</b>	<b>100,00 %</b>	<b>96,21%</b>	<b>96,21</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima

**Tabel 3.27**  
**Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air bersih**

Uraian	Realisasi Penanganan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Penanganan	2.725	1.861	3.277	2.323	1.167
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	28.329	30.190	33.467	35.790	36.957
Laju Pertumbuhan Rumah Tangga	37.171	37.330	38.382	38.382	41.506

Sumber: Dinas PUPR Kota Bima

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Akhir RPJMD 2018 sebesar 38.414 rumah tangga atau 100%, maka capaian kinerja rumah tangga berakses air bersih layak baru mencapai 36.957 rumah tangga 96,21%.

**Tabel 3.28**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2018 terhadap target RPJMD**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target RPJMD (2018)</b>	<b>Kinerja Sampai Tahun 2018</b>					<b>Capaian (%)</b>
		2014	2015	2016	2017	2018	
Persentase Rumah tangga berakses air bersih	<b>100,00</b>	<b>88,18</b>	<b>91,17</b>	<b>92,07</b>	<b>93,25</b>	<b>96,21</b>	<b>96,21</b>

Sumber: Hasil perhitungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja rumah tangga berakses air bersih, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Selain faktor-faktor pendorong keberhasilan, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah tangga berakses air bersih ini, antara lain :

- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kawasan permukiman.
- Meningkatkan dan merevitalisasi keberadaan PDAM Kota Bima .

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

#### b. Persentase Rumah Layak Huni

Meningkatnya Layak Huni mengandung makna adanya bantuan pelayanan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni baik di kawasan permukiman kumuh, maupun kawasan tidak kumuh.

Pada tahun 2018, target ketersediaan rumah layak huni ditargetkan sebesar 92,50% dari total rumah yang tersedia, dan tercapai sebesar 90,18%.

Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja utama Persentase rumah layak huni disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.29**  
**Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Layak Huni di Kota Bima**  
**Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Layak Huni	92,50%	90,18%	<b>97,49</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman, data diolah

Mengacu pada data tabel tersebut, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2018 belum mampu dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain bencana banjir bandang pada akhir tahun 2016 serta perubahan data base perumahan berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sebaran data rumah layak huni sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.30**  
**Data Rumah Layak Huni Kota Bima tahun 2018**

No	Kecamatan	Kondisi Rumah		Jumlah
		Layak Huni	Tidak Layak Huni	
1	Rasanae Barat	6.502	554	7.056
2	Mpunda	6.468	758	7.226
3	Raba	8.142	941	9.083
4	Rasanae Timur	4.012	519	4.561
5	Asakota	6.285	647	6.932
	Jumlah	31.409	3.419	34.828

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Kemudian apabila dibandingkan dengan tahun capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, 2017 maka terjadi penurunan capaian kinerja yang disebabkan terdapat peningkatan kinerja sebesar 12,17% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.31**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah layak Huni tahun 2018 dengan tahun sebelumnya**

<b>Indikator Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Tahun 2014	86,00%	88,18%	102,53
Tahun 2015	<b>87,00%</b>	<b>89,17%</b>	102,49
Tahun 2016	<b>88,00%</b>	<b>90,07%</b>	102,35
Tahun 2017	<b>90,00%</b>	<b>91,30%</b>	101,44
<b>Tahun 2018</b>	<b>92,50 %</b>	<b>90,18%</b>	<b>97,49</b>

Sumber : Hasil Analisis

Kemudian capaian kinerja tahun 2018 jika di bandingkan dengan target jangka menengah RPJMD tahun 2013-2018 maka kinerja Persentase rumah layak huni di tahun 2018 baru mencapai 97,49%.

**Tabel 3.32**  
**Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target di Akhir RPJMD 2018</b>	<b>Realisasi Sampai Tahun 2018</b>	<b>Capaian</b>
Porsentase rumah layak huni	92,50%	90,18%	97,49%

Sumber: Hasil Analisa

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum dapat terealisasinya target RPJMD untuk indikator kinerja persentase rumah layak huni, antara lain :

Faktor pendukung

- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Faktor Penghambat

- Faktor bencana alam banjir bandang yang berdampak pada kerusakan bangun rumah terutama di kawasan bantaran sungai.
- Banyak rumah tidak layak huni yang berada di atas lahan yang bukan hak milik seperti rumah-rumah yang ada dalam kawasan PELINDO.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah layak huni, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD sehingga terjadi sinergitas dan menghindari konflik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan sanitasi, persampahan, air bersih, perumahan dan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

Adapun program pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kota Bima pada tahun 2018 meliputi:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Pemberdayaan komunitas perumahan

c. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik

Pada tahun 2018 Penanganan rumah tangga bersanitasi yang diwujudkan melalui “Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah” dengan kegiatan “Penyediaan prasarana dan sarana air limbah” sebanyak 1.579 rumah tangga (6.331 jiwa) atau 3,80%. Capaian kinerja ditahun 2018 ditargetkan 38.414 rumah tangga (154.010 jiwa) dan terealisasi 35.058 rumah tangga (140.557 jiwa) atau sebesar 91,26%.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.33**  
**Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik di Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik	100%	91,26%	<b>91,26</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 2018

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa target kinerja di tahun 2018 belum mampu dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, target yang dituangkan dalam RPJMD terlalu tinggi mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Kemudian faktor penyebab yang lain adalah dampak banjir bandang akhir tahun 2016 sehingga belum semua jaringan sanitasi dipulihkan dan ditingkatkan.

Jika diukur dengan capaian tahun 2017, rumah tangga bersanitasi telah mencapai 33.479 rumah tangga (134.277 jiwa) dengan target rumah tangga 34.558 (134.227 jiwa) atau 96,88%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5.61%. Hal ini terjadi setelah dilakukan pemutahiran data base yang didukung oleh program KOTAKU.

Jika diukur dengan target akhir RPJMD 2018 juga mengalami penurunan, pada tahun 2017 telah mencapai 87,23% sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 84,47% maka terjadi penurunan sebesar 2,76%. Penurunan capain kinerja ini disebabkan oleh :

- a) laju pertumbuhan penduduk/rumah tangga lebih cepat dari yang ditargetkan (38.414 jumlah rumah tangga yang ditargetkan, 41.506 Rumah tangga yang terealisasi).
- b) Fokus penanganan pada tahun 2018 adalah rehab rekon pasca banjir akhir tahun 2016 dan awal 2017.

**Tabel 3.34**

**Capaian Kinerja Rumah Tangga Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun RPJMD				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target RPJMD	27.972	29.350	30.705	34.558	38.414
Penanganan	1.879	709	2.237	2.685	1.579
Rumah Tangga Bersanitasi	27.848	28.557	30.794	33.479	35.058
Laju Pertumbuhan Rumah Tangga	37.171	37.330	38.382	38.382	41.506
Persentase Capaian RPJMD	74,92%	76,50%	80,23%	87,23%	84,47%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2018

Hasil pemutahiran DATA BASE Sanitasi KOTA BIMA TAHUN 2019 (Sumber: Data Base KOTAKU) jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 30.828 rumah tangga (123.596 jiwa), sumber data BPS Kota Bima tahun 2018 jumlah total rumah tangga sebanyak 41.506 rumah tangga (166.407 jiwa) sehingga persentase rumah tangga bersanitasi 74,27%, yang akan dijadikan data awal penyusunan RENSTRA dan RPJMD periode berikutnya.

**Tabel 3.35.**

**Database Sanitasi KOTA BIMA Tahun 2018**

NO	KEC./KEL.	2017			Penambahan 2018			Jumlah
		Jamban Sendiri/bersama (< 5 KK / jamban bersama)	Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	Tidak di jamban	IPAL	Septictank Komunal	Septictank Individual	
<b>A.</b>	<b>Sistem Sanitasi Kec. Asakota</b>	<b>3.767</b>	<b>605</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>50</b>	<b>4.959</b>
	1 Kel. Melayu	1.146	198	41	0	0	50	1.435
	2 Kel. Jatiwangi	1.700	248	183	0	100	0	2.231
	3 Kel. Jatibaru	N/A	N/A	N/A	0	90	0	90
	4 Kel. Kolo	921	159	123	0	0	0	1.203
<b>B.</b>	<b>Sistem Sanitasi Kec. Rasanae Barat</b>	<b>4.898</b>	<b>389</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>5.780</b>
	1 Kel. Tanjung	948	203	25	0	0	50	1.226
	2 Kel. Sarae	1.022	61	33	0	0	128	1.244
	3 Kel. Paruga	1.021	8	10	0	0	50	1.089
	4 Kel. Dara	912	48	74	0	0	50	1.084
	5 Kel. Pane	422	21	6	0	0	59	508
	6 Kel. Nae	573	48	8	0	0	0	629
<b>C.</b>	<b>Sistem Sanitasi Kec. Mpunda</b>	<b>5.885</b>	<b>230</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>166</b>	<b>6.865</b>
	1 Kel. Santi	498	11	5	0	0	0	514
	2 Kel. Manggemaci	652	6	168	0	0	50	876
	3 Kel. Monggonao	888	7	22	0	0	60	977
	4 Kel. Sadia	707	13	29	0	0	0	749
	5 Kel. Lewirato	377	-	2	0	0	0	379
	6 Kel. Sambinae	460	79	119	0	60	0	718
	7 Kel. Panggi	617	28	29	0	0	56	730
	8 Kel. Mande	577	24	15	0	0	0	616
	9 Kel. Penatoi	626	4	31	0	0	0	661
	10 Kel. Matakando	483	58	34	0	70	0	645
<b>D.</b>	<b>Sistem Sanitasi Kec. Raba</b>	<b>6.132</b>	<b>614</b>	<b>1.493</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>252</b>	<b>8.561</b>
	1 Kel. Rabangodu Selatan	684	33	17	0	0	50	784
	2 Kel. Rabangodu Utara	869	4	-	0	0	0	873
	3 Kel. Rontu	294	93	210	0	0	50	647
	4 Kel. Nitu	72	34	229	0	0	0	335
	5 Kel. Rabadompun Barat	1.033	54	107	0	70	0	1.264

NO	KEC./KEL.	2017			Penambahan 2018			Jumlah
		Jamban Sendiri/ bersama (< 5 KK / jamban bersama)	Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	Tidak di jamban	IPAL	Septictank Komunal	Septictank Individual	
6	Kel. Rabadompu Timur	789	39	35	0	0	0	863
7	Kel. Rite	411	55	61	0	0	0	527
8	Kel. Ntobo	365	75	479	0	0	0	919
9	Kel. Penanae	669	18	152	0	0	0	839
10	Kel. Kendo	140	91	151	0	0	0	382
11	Kel. Penaraga	806	118	52	0	0	152	1.128
<b>E.</b>	<b>Sistem Sanitasi Kec. Rasane Timur</b>	<b>2.473</b>	<b>531</b>	<b>1.275</b>	<b>110</b>	<b>170</b>	<b>104</b>	<b>4.663</b>
1	Kel. Kumbe	930	96	232	0	0	50	1.308
2	Kel. Kodo	390	14	99	0	0	0	503
3	Kel. Dodu	417	77	309	0	0	0	803
4	Kel. Lampe	249	4	92	0	0	54	399
5	Kel. Lelamase	144	55	201	50	0	0	450
6	Kel. Nungga	224	109	219	60	80	0	692
7	Kel. Oi fo'o	119	176	123	0	90	0	508
	Total	23.155	2.369	3.725	110	560	909	30.828

Sumber: KOTAKU Kota Bima, 2018

## 5. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

### a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 merupakan penilaian atas kinerja instansi pemerintah kota Bima Tahun 2017 dengan target nilai 65,00 dan terealisasi sebesar 63,64 (kategori B/Baik) atau capaian kinerja sebesar 97,91%.

**Tabel 3.36**

**Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	65	63,64	<b>97,91</b>

Sumber: Bagian OPA Setda Kota Bima

Kategori B menunjukkan tingkat efektifitas yang dinilai baik dalam penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang beroreantasi pada hasil di pemerintah Kota Bima. Namun tingkat efisiensinya masih harus ditingkatkan lagi.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,06 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 yang hanya sebesar 62,58.

**Tabel 3.37**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Tahun 2014	50,01	45,54	91,06
Tahun 2015	<b>55,00</b>	<b>51,51</b>	93,65
Tahun 2016	<b>60,01</b>	<b>60,03</b>	100,03
Tahun 2017	<b>63</b>	<b>62,58%</b>	99,33
<b>Tahun 2018</b>	<b>65</b>	<b>63,64</b>	<b>97,91</b>

Sumber : Hasil Analisis

Faktor yang mendukung peningkatan nilai kinerja instansi pemerintah Kota Bima , adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bima telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun 2017.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima memuat visi, misi, dan tujuan yang disertai dengan ukuran target keberhasilan, memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran serta target tahunan. RPJMD Kota Bima pun telah dipublikasikan melalui website Kota Bima
- 3) Kota Bima telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima dan Perangkat Daerah (PD). IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 4) Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan hasil pengukuran kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2016 telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga laporan

Kinerja OPD telah disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Laporan Kinerja OPD pun telah direviu oleh APIP;

- 6) Pemerintah Kota Bima, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencapaian kinerja serta evaluasi terhadap laporan kinerja OPD. Evaluasi tersebut menggunakan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja mengacu kepada pedoman evaluasi kinerja yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti untuk memperbaiki perencanaan program dimasa yang akan datang. sedangkan hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- 7) Capaian Kinerja Kota Bima dan OPD nya telah menampakkan ke arah perbaikan.

Upaya yang akan dilakukan oleh pemkot Bima untuk meningkatkan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) OPD di lingkungan Kota Bima akan menetapkan cascading kinerja berdasarkan proses bisnis organisasi
- 2) Melakukan perbaikan terhadap IKU OPD sehingga dapat menggambarkan keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya (sesuai dengan prinsip SMART). Pemerintah Kota Bima dan OPD mempertajam sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan merubah indikator-indikator sehingga lebih berorientasi pada hasil/ outcomes, daripada proses dan output/keluaran.
- 3) Melakukan perbaikan terhadap ukuran kinerja Individu untuk tingkat eselon III dan IV yang merupakan turunan dari kinerja atasannya serta dmengacu pada urain tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga pencapaiannya dapat secara langsung mendukung kinerja atasannya.
- 4) Mengembangkan metode pengumpulan data kinerja yang mudah diterapkan sehingga capaian kinerja dapat diinformasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan kinerja paling tidak mempunyai pedoman pengumpulan data kinerja dan pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk pengelolaan data kinerja. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bima;

- 5) Laporan kinerja OPD di lingkungan Kota Bima akan menginformasikan kinerjanya dengan baik, terutama yang berkaitan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
- 6) Meningkatkan kualitas evaluasi internal, dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi internal. Pedoman evaluasi internal akan disesuaikan dengan karakteristik implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bima, namun tetap mengacu kepada Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7) Kompetensi maupun kualitas evaluator akan ditingkatkan dengan pelatihan yang teratur. Dan evaluasi internal seharusnya dimulai dari perencanaan yang didukung oleh semua aparatur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung;
- 8) Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian kinerja atas dokumen-dokumen kinerja yang telah ditetapkan.

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja penilaian kinerja instansi pemerintah daerah adalah:

1. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
  4. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur
  5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- b. Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2018 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2017 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terealisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.

**Tabel 3.38**  
**Realisasi Indikator Opini BPK terhadap LKPD Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	<b>100</b>

Sumber: Inspektorat Kota Bima

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mempertahankan capaian kinerja di tahun 2017 yang juga berpredikat WTP. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.39**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD tahun 2018 dengan tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Tahun 2014	WTP	WTP	100
Tahun 2015	WTP	WTP	100
Tahun 2016	WTP	WTP	100
Tahun 2017	WTP	WTP	100
<b>Tahun 2018</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>100</b>

Sumber : Inspektorat Kota Bima

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian target RPJMD sampai tahun 2018 telah tercapai 100%.

Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja , agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu :

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

c. Persentase OPD dengan Indeks SAKIP baik

Persentase Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi OPD di Kota Bima merupakan penilaian atas kinerja OPD Tahun 2018 dengan target 80%, berhasil direalisasikan sebesar 82,76% atau dengan tingkat capaian 103,45%.

**Tabel 3.40**  
**Realisasi Indikator Persentase OPD dengan Indeks SAKIP Baik di Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD dengan Indeks SAKIP Baik	80%	82,76	<b>103,45</b>

Sumber: Inspektorat Kota Bima

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima
  - b. Evaluasi LKIP OPD

## 6. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang.

Tingkat keberhasilan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima tergambar dari pencapaian indikator kinerja utama berupa Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan penetapan target dengan hasil BAIK (62,51-81,25) dan Realisasi capaian telah memenuhi target yang ditetapkan%. Adapun beberapa jenis Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi Indikator penilaian yang mendukung sebagai berikut :

- Unsur **Persyaratan** , dengan dilakukannya penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis dan sarana penunjang lainnya sebagai syarat dalam melaksanakan pelayanan sehingga mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dengan Nilai 71,83
- Unsur **Prosedur** mengacu kepada SOP Pelayanan perizinan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan adil dengan Nilai 74,83
- Unsur **waktu penyelesaian** dapat dilakukan pengaturan waktu pelayanan sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dengan Nilai 74,67
- Terhadap unsur Biaya/Tarif, dapat dilakukan penyesuaian regulasi agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan hal ini, nilai 88,00
- Unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa menggunakan format buku mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk setiap jenis pelayanan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan Nilai 89,00
- Unsur **Kompetensi Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan menempatkan petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan Nilai 81,00
- Unsur **Perilaku Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas

pelayanan yang berdedikasi tinggi, berpenampilan baik, ramah, sopan dan memahami prinsip-prinsip pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan Nilai 81,83

- Unsur Maklumat pelayanan, dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasaranan penunjang kegiatan pelayanan termasuk penganggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit pelaksanaan pelayanan, dengan Nilai 85,83
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, bahwa terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukan telah ditindak lanjuti dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menangani hal itu, dengan nilai 84,83

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah : tersedianya anggaran yang cukup; adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

## **7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Gambaran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh hasil pengukuran indikator kinerja pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 di Kota Bima dapat ditunjukkan dari hasil data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima Tahun 2018 yang isinya memuat kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2017.

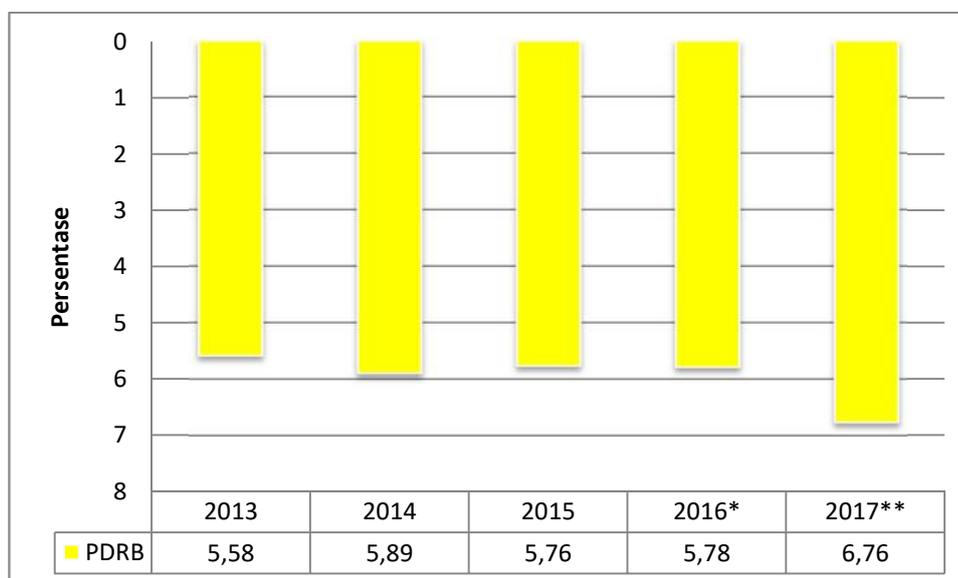
Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebesar **6,76% dari target 6,50%**. Dengan demikian capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Bima telah melebihi target.

**Tabel 3.41**  
**Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB	6,50%	6,76%	<b>104</b>

Sumber: Hasil Perhitungan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka angka pertumbuhan PDRB tersebut mengalami lompatan yang sangat signifikan. Berikut digambarkan perbandingan capaian kinerja indikator Pertumbuhan PDRB Kota Bima tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.



Secara lebih rinci perbandingan pertumbuhan PDRB tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya di Kota Bima menurut lapangan usaha sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.42**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya**

	Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	3,70	4,01	1,92	4,55
B	Pertambangan dan Penggalian	(5,10)	6,56	7,39	6,21	7,85

	Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
C	Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	38,91	(5,25)	17,35	3,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
F	Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,56	5,88	5,45	7,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
J	Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	6,12	6,52	6,37	9,58
L	Real Estate	6,00	6,50	6,43	5,85	5,84
M,N	Jasa Perusahaan	4,89	7,32	5,15	5,35	5,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	5,56	3,83	2,64	2,70
P	Jasa Pendidikan	4,55	6,36	6,28	5,87	6,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,38	6,84	5,30	5,89	5,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,54	6,12	6,03	6,60	7,95
	<b>PDRB</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,76</b>	<b>5,78</b>	<b>6,76</b>

Sumber: BPS Kota Bima tahun 2018

Lebih lanjut, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 yaitu sebesar 6,5 persen pada tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sampai saat sekarang sudah melebihi target dengan tingkat capaian **104%**. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .

- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen .

Adapun sejumlah faktor keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program penciptaan iklim UKM yang kondusif, Program pengembangan sistem pendukung UMKM, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan disiplin aparatur, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

## 8. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya.

Sebagaimana angka PDRB pada umumnya bahwa capaian kinerja indikator pendapatan per kapita tahun 2018 merupakan data kondisi 2017 yang secara resmi publikasi oleh BPS.

Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga berlaku ditargetkan sebesar 25 juta rupiah dengan realisasi sebesar 21,90 juta rupiah atau dengan tingkat capaian 87,60 persen.

**Tabel 3.43**

**Realisasi Indikator Kinerja Pendapatan per kapita Kota Bima Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Pendapatan per kapita	Rp.25 juta	Rp. 21,90 juta	<b>87,60</b>

Sumber: Hasil Analisa

Dengan demikian target kinerja indikator kinerja pendapatan per kapita belum mampu dicapai pada tahun 2018.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka pendapatan perkapita terus mengalami pertumbuhan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pendapatan per kapita Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB Perkapita (Ribu Rp)	15.504	17.079	18.744	20.237	21.902
Pertumbuhan (%)	3,30	3,66	3,54	3,62	4,64

Sumber : BPS Kota Bima, 2018 \*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 21,902 ribu rupiah atau meningkat sebesar 4,64 persen dari tahun sebelumnya yang dihitung sebesar 18,74 juta rupiah per tahun. Demikian juga dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir, PDRB Perkapita selalu menunjukkan tren yang positif. PDRB Perkapita juga terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 yang sebesar 1,1 persen. Artinya keadaan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bima semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan perkapita yang dicapai sampai saat ini sebesar 21,90 juta rupiah jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan 2018 yang sebesar 25 juta rupiah, maka realisasi kinerja sampai tahun 2018 belum mampu memenuhi target RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018

Berkaitan dengan penilaian penggunaan sumber daya yang dimiliki, apabila dilakukan perbandingan antara besaran sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya dan pembiayaan dengan capaian kinerja lebih dari 95 persen. Lebih lanjut, dalam rangka lebih meningkatkan lagi pendapatan perkapita pada tahun-tahun yang akan datang, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah, program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, program pengembangan IKM perlu terus dioptimalkan.

## 9. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama sebagaimana berikut.

### a. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima, menetapkan Panjang Jalan Kota Bima 204,34 Km, di pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan atas Penetapan Status Ruas Jalan Kota melalui Perwali nomo 381 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Kota Bima, dengan Panjang 258,11 Km. sehingga membawa dampak pada perubahan target kinerja pada RPJMD maupun Renstra Dinas PUPR.

Indikator panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang ditangani tahun 2018 sepanjang 19,15 km atau sebesar 7,42% dari total panjang jalan kota. Capaian kinerja panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik telah terealisasi sepanjang 215,77 Km dari target 219,39 Km.

**Tabel 3.45**  
**Realisasi Indikator Kinerja Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2018**

Indikator	Capaian 2017 (%)	2018			Target Akhir RPJMD (km)	Capaian s.d. 2018 terhadap RPJMD (%)
		Target (km)	Realisasi (km)	%		
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	76,18	219,39	215,77	98,35	258,11	83,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

Jika diukur dengan capaian tahun 2017 panjang jalan kota dalam kondisi baik tercatat sepanjang 196,62 km dari target 189,50 Km atau 103,76%

(Kondisi baik 145,49 dan kondisi sedang 51,13 km), kondisi sedang masih digolongkan ke dalam kondisi baik. Maka terjadi penurunan 5,41%.

Jika diukur dengan target akhir RPJMD 2018 sepanjang 219,39 Km atau 85,00% maka pencapaian kinerja pada indicator ini melalui program Peningkatan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sudah terealisasi sepanjang 258,11 Km atau 83,60%

**Tabel 3.46**  
**Pengukuran Kinerja Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Tahun Perencanaan RPJMD				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target Tahunan	124,50	132,82	143,04	189,50	219,39
Penanganan	2,58	11,30	9,91	49,48	19,15
Panjang Jalan Kondisi Baik	125,93	137,23	147,14	196,62	215,77
Total Panjang Jalan Kota	204,34	204,34	258,11	258,11	258,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik, antara lain :

- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur khususnya kawasan perkotaan.
- Fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis provinsi.

Pencapaian sasaran strategis peningkatan infrastruktur perkotaan menemui beberapa hambatan/masalah, seperti :

- Kondisi topografi berpengaruh pada penyediaan infrastruktur jalan, di mana pada kawasan yang berbukit, trase jalan lebih panjang karena mengikuti pola topografi kawasan. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya yang harus disediakan untuk penyediaan infrastruktur jalan tersebut.
- Adanya kelompok-kelompok permukiman yang jauh dari kawasan perkotaan menjadikan tingginya infrastruktur yang harus disediakan untuk menjamin ketersediaan akses ke kawasan tersebut.
- Tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman baru menuntut meningkatnya ketersediaan infrastruktur.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan infrastruktur perkotaan ini, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk terus mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur.
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai prioritas, potensi dan permasalahan per kawasan.

b. Persentase luas pemukiman kumuh

Pada awal tahun perencanaan, tahun 2014 melalui Sk Kumuh Walikota Bima Nomor 371 tercatat 59,48 Ha dengan dasar penetapan hasil survey pada 17 kelurahan yang ada di kota bima. Berselang 2 (dua) tahun, pada tahun 2016 melalui SK Walikota Nomor 620 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bima Tahun 2016, ditetapkan luas kawasan kumuh sebesar 147,36 Ha dengan 8 indikator dan 15 parameter sebagai alat pengukuran.

Pada tahun 2018 kembali dikeluarkan SK Walikota Bima Nomor 524 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bima, dan berlaku sejak tanggal 12 April 2018. yang mengacu pada hasil pemuktahiran data baseline Kawasan Kumuh dengan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh sebagai alat ukur pada 36 kelurahan sebesar 310,56 Ha.

Penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh tahun 2018 sebesar 135,58 Ha, ini dicapai melalui program Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Pengukuran Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.47**  
**Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Permukiman Kumuh**

Indikator	Capaian 2017 (sisa kumuh %)	2018			Target Akhir RPJMD (Ha)	Capaian s.d. 2018 terhadap RPJMD (%)
		Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	11,45	310,56	174,98	56,34	310,56	174,98 (56,34)

Jika diukur dengan capaian tahun 2017 luas permukiman kumuh tertangani sebesar 141,53 Ha dari target 143,71 Ha atau 98,49% Maka terjadi penurunan kinerja sebesar 42,14%

Jika diukur dengan target akhir RPJMD 2018 sebesar 310,56 Ha atau 0% maka pencapaian kinerja pada indikator ini melalui Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh masih tersisa 174,98 Ha atau 14,16%.

**Tabel.3.48**  
**Pengukuran Kinerja Persentase permukiman kumuh tertangani**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Data Awal RPJMD	Tahun RENSTRA/RPJMD				
		2014	2015	2016	2017	2018
Target Renstar/RPJMD		92,66	88,99	147,39	143,71	310,56
Penanganan	108,98	20,03	2,50	3,67	2,19	135,58
Sisa Kawasan Kumuh		88,95	86,45	143,72	141,53	174,98
Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman		1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
Persentase Capaian RPJMD		7,20%	6,99%	11,63%	11,45%	14,16%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 3.49**  
**Lampiran Keputusan Walikota Bima Nomor 524 Tahun 2018 tentang**  
**Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bima**  
**Tahun 2018**

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Keterangan Tingkat Kumuh	Luas Pengurangan Kumuh 2018 (Ha)	Sisa Luas Permukiman Kumuh 2018 (Ha)
1.	Mpunda	1	Manggemaci	7,56	Berat	5,62	1,94
		2	Monggonao	2,13	Ringan	0,65	1,48
		3	Santi	2,12	Ringan	0,83	1,29
		4	Sambinae	4,58	Sedang	2,81	1,77
		5	Penatoi	6,83	Ringan	2,58	4,25
		6	Mande	5,51	Ringan	0,62	4,89
		7	Sadia	3,23	Ringan	1,69	1,54
		8	Matakando	1,5	Ringan	0,57	0,93
		9	Panggi	2,4	Ringan	0,91	1,49
2.	Raba	10	Penaraga	8,49	Sedang	8,49	0
		11	Rontu	3,17	Sedang	0,05	3,12
		12	Rabangodu Utara	5,81	Ringan	5,81	0
		13	Rabadompu Barat	1,78	Sedang	1,5	0,28
		14	Rabadompu Timur	3,7	Ringan	1,40	2,3
		15	Rabangodu Selatan	4,9	Ringan	1,85	3,05
		16	Nitu	7,11	Ringan	2,68	4,43
		17	Rite	8,13	Ringan	2,37	5,76
		18	Penanae	6,24	Ringan	1,05	5,19
		19	Kondo	8,76	Ringan	3,31	5,45
3.	Asakota	20	Ntobo	13,06	Ringan	1,43	11,63
		21	Kolo	3,96	Sedang	1,49	2,47
		22	Jatiwangi	18,81	Sedang	7,11	11,7

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Keterangan Tingkat Kumuh	Luas Pengurangan Kumuh 2018 (Ha)	Sisa Luas Permukiman Kumuh 2018 (Ha)
4.	Rasanae Barat	23	Jatibaru	16,58	Sedang	6,26	10,32
		24	Melayu	9,24	Berat	7,82	1,42
		25	Paruga	9,01	Berat	9,01	0
		26	Tanjung	14,91	Berat	5,99	8,92
		27	Sarae	7,73	Berat	7,21	0,52
		28	Dara	21,39	Berat	6,15	15,24
		29	Nae	10,12	Berat	10,12	0
5.	Rasanae Timur	30	Lelamase	11,74	Sedang	4,44	7,3
		31	Nungga	11,99	Ringan	4,53	7,46
		32	Dodu	9,31	Sedang	3,52	5,79
		33	Oi Fo'o	22,6	Sedang	8,54	14,06
		34	Kumbe	23,25	Ringan	2,3	20,95
		35	Kodo	6,3	Ringan	2,37	3,93
		36	Lampe	6,61	Ringan	2,50	4,11
<b>Jumlah Total Kumuh</b>				<b>310,56</b>		<b>135,58</b>	<b>174,98</b>

Menurunnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh :

- a. Bencana alam (banjir bandang bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017) yang mengakibatkan banyak kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur.
  - b. Fokus penanganan pada tahun 2018 adalah Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
  - c. Penambahan indikator kriteri kumuh sebagai dasar penentuan kumuh.
- c. Persentase luas kawasan tepian air yang tertata

Konsep kota tepian air merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kota di sepanjang pesisir Teluk Bima khususnya mulai dari Perbatasan Kota di Kawasan Niu sampai dengan Kawasan Pelabuhan Laut Bima dengan luas keseluruhan 138,15 hektar. *Waterfront city* (Kota Tepian) adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Sedangkan secara khusus di Kota Bima *waterfront city* Teluk Bima adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan tepi pantai yaitu mulai dari Niu – Lawata sampai Amahami. Penataan dan pembangunan kota tepian air diartikan sebagai suatu proses pembangunan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke

perairan. Kawasan *waterfront city* biasanya berupa area pelabuhan, perdagangan, pariwisata, permukiman atau industri.

Penataan kawasan Kota Tepian Air Teluk Bima terutama di Kawasan Lawata, Amahami dan Pantai Kolo pada tahun 2018 mampu terealisasi seluas sekitar 4,14 hektar, dari target sebesar 6,35 hektar atau terealisasi 65,35 persen.

**Tabel 3.50**  
**Realisasi Indikator Kinerja Persentase luas kawasan tepian air yang tertata Kota Bima Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Persentase luas kawasan tepian air yang tertata</b>	<b>15,50%</b>	<b>10,13</b>	<b>65,35</b>

Sumber: Hasil perhitungan

**Tabel 3.51**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase luas kawasan tepian air yang tertata Kota Bima Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
2015	2,71 %	2,53 %	93,37 %
2016	10,00 %	3,98 %	39,78 %
2017	10,00%	7,39%	73,90 %
<b>2018</b>	<b>15,50%</b>	<b>10,13</b>	<b>65,35</b>

Sumber : Hasil Perhitungan

Capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima sampai dengan tahun 2018 memang dirasakan melambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan penataan dan pembangunan kawasan kota tepian air Teluk Bima yaitu antara lain :

- Belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kecamatan Rasanae Barat di tingkat BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sehingga pembahasan raperda pada Badan legislasi belum bisa dilakukan. Hal ini sedikit menghambat investasi pada lahan-lahan privat dikarenakan arahan

pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi wilayah yang belum ditetapkan dalam bentuk perda RDTR.

- Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat menyebabkan investasi di bidang infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan juga berpengaruh.
- Dampak banjir bandang tahun 2016 sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima adalah antara lain: :

- Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan kota tepian air Teluk Bima sebagai icon atau *landmark* Kota Bima.
- Sudah tersedia design arsitektur dan *detail engineering design* (DED) yang memadukan unsur arsitektur modern dengan unsur arsitektur lokal (budaya *dana mbojo*) sebagai panduan dan pedoman dalam melakukan penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan jalan dan jembatan, program perencanaan dan pengendalian tata ruang, program peningkatan sarana dan prasarana pertamanan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

### **3.3. Analisa Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis**

Berdasarkan uraian pengukuran capaian kinerja setiap sasaran strategis tersebut di atas, maka dapat dibuat rekapitulasi keberhasilan pencapaian setiap indikator kinerja utama seperti dalam table berikut

**Tabel 3.52.**  
**Tingkat Keberhasilan Capaian Setiap Indikator Kinerja Utama Kota Bima**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% capaian	Kategori
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,20	10,14	99,41	BERHASIL
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	7	7,22	103,14	BERHASIL
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	7	3,66	52,29	TIDAK BERHASIL
2	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	74,10	74,31	100,28	BERHASIL
		Persentase penduduk miskin	%	7,00	8,79	79,64	CUKUP BERHASIL
		Pengangguran terbuka	%	3,80	2,39	159	BERHASIL
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	%	0,00	0,003	97,00	BERHASIL
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	75	122	61,48	KURANG BERHASIL
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	100	96,21	96,21	BERHASIL
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	90,18	97,49	BERHASIL
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	100	91,26	91,26	BERHASIL
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65	63,64	97,91	BERHASIL
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00	BERHASIL
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	82,76	103,45	BERHASIL
6	Meningkatnya pelayanan publik prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25	BERHASIL

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% capaian	Kategori
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,50	6,76	104	BERHASIL
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	25	21,9	87,60	BERHASIL
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	85,00	83,60	98,35	BERHASIL
		Persentase luas permukiman kumuh	%	0	14,16	56,34	KURANG BERHASIL
		Persentase luas kawasan tepian yang tertata	%	15,50	10,13	65,35	KURANG BERHASIL
						<b>92,57</b>	

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut, apabila dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan kategori keberhasilan, maka terlihat bahwa terdapat 16 indikator kinerja utama yang termasuk kategori BERHASIL, 3 indikator kinerja utama yang KURANG BERHASIL dan 1 indikator kinerja utama yang TIDAK BERHASIL.

**Tabel 3.53**  
**Kategori Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kota Bima tahun 2018**

No.	Kategori	Indikator Kinerja	Persentase Capaian
1.	Berhasil	16	80,00
2.	Cukup Berhasil	0	0,00
3.	Kurang Berhasil	3	15,00
4.	Tidak Berhasil	1	5,00
<b>Jumlah</b>		20	100,00

Sumber: Hasil Perhitungan

Adapun kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2018, menunjukkan bahwa terdapat 7 sasaran yang masuk kategori berhasil dan 2 sasaran strategis yang masuk kategori cukup berhasil sebagaimana disajikan dalam table berikut ini.

**Tabel 3.54**  
**Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	84,95	BERHASIL
2.	Meningkatnya daya saing	112,97	BERHASIL
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	79,24	CUKUP BERHASIL
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	95,98	BERHASIL
5.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100,45	BERHASIL
6.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	101,25	BERHASIL
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	104	BERHASIL
8.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	87,60	BERHASIL
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	73,34	CUKUP BERHASIL

Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 9 (Sembilan) sasaran strategis sebesar 93,31% dengan kategori 7 (tujuh) sasaran strategis BERHASIL dan 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori CUKUP BERHASIL. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-9, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik dengan capaian sebesar 73,34%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-2, yaitu meningkatnya daya saing dengan capaian kinerja mencapai 112,97%.

**Tabel 3.55**  
**Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2018**

No.	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1.	Berhasil	7	77,78
2.	Cukup Berhasil	2	22,22
3.	Kurang Berhasil	0	0,00
4.	Tidak Berhasil	0	0,00

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018 dikategorikan berhasil sebesar 77,78% dan yang cukup berhasil sebesar 22,22%.

### 3.4. Realisasi Anggaran

#### A. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan daerah kota Bima pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 797.016.283.441,20 terealisasi sebesar Rp. 768.158.939.664,82 atau 96,38%. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 799.256.543.005,79 terealisasi sebesar Rp. 956.667.546.835,11 atau 119,69%. Total jumlah penerimaan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 188.508.607.170,29 atau 80,30%.

**Tabel 3.56**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018**

No.	Komponen	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44.309.136.205,20</b>	<b>46.203.686.100,62</b>	<b>104,28</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.103.000.000,00	15.953.336.197,49	99,07
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.419.653.000,00	5.851.506.595,00	69,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.650.003.101,20	1.650.003.101,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.136.480.104,00	22.748.840.207,13	125,43
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>668.526.271.477,00</b>	<b>640.693.906.827,00</b>	<b>95,84</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.667.395.477,00	32.683.048.442,00	59,79
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455.972.250.000,00	455.972.250.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	157.886.626.000,00	152.038.608.385,00	96,30
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>84.180.875.759,00</b>	<b>81.261.346.737,20</b>	<b>96,53</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	17377200000	16.658.549.586,20	95,86
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.053.675.759,00	36.843.221.871,00	94,34
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27.750.000.000,00	27.750.000.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9575280	#DIV/0!
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>797.016.283.441,20</b>	<b>768.158.939.664,82</b>	<b>96,38</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2018 (data sebelum audit BPK)

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, PAD menyumbang 6,01% dari total pendapatan Kota Bima. Sedangkan kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu mencapai 83,41% dan sisanya sebesar 10,58% adalah berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## B. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 997.464.255.069,72 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 852.955.415.742,94 atau sebesar 85,51%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 489.472.889.511,72 Pemerintah Kota Bima mampu merealisasikan sebesar Rp. 398.903.884.426,00 atau sebesar 81,50%. Adapun terkait belanja langsung dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 507.991.365.558,00 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 454.051.531.316,94 atau sebesar 89,38%.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.57.**  
**Rekapitulasi Belanja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018**

No	Komponen Belanja Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>489.472.889.511,72</b>	<b>398.903.884.426,00</b>	<b>81,50</b>
1.1.	Belanja Pegawai	322.500.865.044,72	307.775.708.108,00	95,43
1.2.	Belanja Hibah	38.177.116.270,00	36.873.284.336,00	96,58
1.3.	Belanja Bantuan Sosial	125.857.746.000,00	51.662.314.789,00	41,05
1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	822.411.656,00	822.411.652,00	100,00
1.5	Belanja Tidak Terduga	2.114.750.541,00	1.770.165.541,00	83,71
<b>2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>507.991.365.558,00</b>	<b>454.051.531.316,94</b>	<b>89,38</b>
2.1.	Belanja Pegawai	45.556.696.021,00	43.254.662.720,00	94,95
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.798.530.657,98	176.178.386.289,00	93,32
2.3.	Belanja Modal	273.636.138.879,02	234.618.482.307,94	85,74
<b>Total Belanja</b>		<b>997.464.255.069,72</b>	<b>852.955.415.742,94</b>	<b>85,51</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2018 (data sebelum audit BPK)

### C. Realisasi Anggaran Program Prioritas

Adapun realisasi sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh pada pencapaian perjanjian kinerja tingkat Kota Bima dideskripsikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.58**  
**Realisasi Anggaran Program Pembangunan Setiap Sasaran Strategis**

<b>Program Prioritas</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya mutu pendidikan</b>			
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.483.154.500,00	2.444.571.146,45	98,45
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.960.682.500,00	27.223.862.649,91	37,04
Program Pendidikan Non Formal	188.946.000,00	174.488.769,00	92,35
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	496.655.000,00	491.371.200,00	98,94
Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	1.711.529.000,00	1.708.751.157,72	99,84
Jumlah	32840967000	32043044923,08	426,62
Rata-rata Capaian			82,04
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing</b>			
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	130.886.500,00	118.459.500,00	90,51
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	372.241.000,00	265.326.800,00	71,28
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	272.043.500,00	226.639.600,00	83,31
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	200.763.000,00	184.184.600,00	91,74
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	36.450.000,00	33.747.000,00	92,58
Program Pengawasan Obat dan Makanan	65.247.000,00	62.277.000,00	95,45
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	11.640.000,00	11.640.000,00	100,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.596.500,00	1.257.240.000,00	94,99
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	151.031.600,00	150.086.200,00	99,37
Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan	2.181.250.000,00	2.116.072.240,00	97,01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	708.716.000,00	706.436.000,00	99,68
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	550.044.000,00	530.224.500,00	96,40
Program pembinaan anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK)	46.990.000,00	46.990.000,00	100,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	22.865.000,00	22.800.000,00	99,72
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	22.996.500,00	22.996.500,00	100,00

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	137.357.000,00	133.222.000,00	96,99
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	221.703.000,00	215.728.000,00	97,30
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	257.520.000,00	248.427.500,00	96,47
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	316.646.000,00	307.820.000,00	97,21
Jumlah	7.029.986.600,00	6.660.317.440,00	1800,01
Rata-rata Capaian			94,74
<b>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.542.055.750,00	1.429.835.020,00	92,72
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.805.006.000,00	9.449.018.523,99	96,37
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	176.762.500,00	174.572.000,00	98,76
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	196.538.500,00	189.422.500,00	96,38
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	915.079.250,00	839.616.950,00	91,75
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.115.126.250,00	1.091.174.703,00	97,85
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	9.527.839.420,00	9.500.769.462,53	99,72
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	9.810.072.648,00	8.421.431.009,00	85,84
Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB	152.707.000,00	140.927.000,00	92,29
Program Keluarga Berencana	316.359.200,00	296.873.525,00	93,84
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	283.710.600,00	282.960.600,00	99,74
Program pelayanan kontrasepsi	1.492.302.000,00	1.101.331.699,00	73,80
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	324.755.000,00	313.206.244,00	96,44
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	30.767.100,00	30.767.100,00	100,00
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	55.034.700,00	53.584.700,00	97,37
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	13.724.800,00	13.724.800,00	100,00
Jumlah	35.757.840.718,00	33.329.215.836,52	1512,87
Rata-rata Capaian			94,19
<b>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar</b>			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.170.891.315,90	19.966.532.686,02	98,99
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.955.919.165,00	13.927.016.397,43	99,79
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	19.273.906.000,00	19.236.075.124,43	99,80
Program Perencanaan Tata Ruang	1.258.030.000,00	1.177.265.394,00	93,58
Program Pengembangan Perumahan	1.821.567.918,00	1.673.512.104,41	91,87
Program perbaikan perumahan akibat bencana	1.965.050.000,00	1.932.481.650,00	98,34

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	Capaian
alam/ social			
Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	369.484.000,00	369.439.000,00	99,99
Program Kesiapsiagaan	669.222.200,00	663.372.200,00	99,13
Program Rekontruksi	51.807.011.160,00	24.302.179.719,36	46,91
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.585.044.075,10	4.576.086.083,17	99,80
Jumlah	115.876.125.834	87.823.960.358,82	928,2
Rata-rata Capaian			77,35
<b>Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>			
Program perencanaan pembangunan daerah	2.133.058.744,00	2.058.737.718,00	96,52
Program perencanaan pembangunan ekonomi	60.485.000,00	57.185.000,00	94,54
Program perencanaan sosial dan budaya	956.312.989,00	895.074.583,00	93,60
Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.238.680.000,00	782.214.635,00	63,15
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	141.290.000,00	136.092.650,00	96,32
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	264.476.250,00	248.911.825,00	94,12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.297.949.800,00	1.259.672.973,00	97,05
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.585.982.100,00	6.139.917.882,00	93,23
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	1.300.450.500,00	1.237.176.419,00	95,13
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.818.044.200,00	2.757.234.533,00	97,84
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.053.505.000,00	805.551.600,00	76,46
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	915.287.100,00	909.307.650,00	99,35
Program Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN	337.184.000,00	327.604.600,00	97,16
Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	189.994.200,00	181.893.340,00	95,74
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	533.312.500,00	513.017.268,00	96,19
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.797.400,00	71.797.400,00	100,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	104.950.470,00	102.154.151,00	97,34
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.960.862.600,00	1.913.712.887,00	97,60
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	175.025.050,00	142.535.998,00	81,44
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	28.575.000,00	23.399.000,00	81,89
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	186.350.357,00	184.350.357,00	98,93
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.213.134.400,00	1.141.168.281,00	94,07
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	858.758.000,00	858.711.100,00	99,99
Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	532.143.000,00	527.635.738,00	99,15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	283.771.500,00	277.552.000,00	97,81
Jumlah	25.252.580.160,00	23.563.809.588,00	2434,62

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	Capaian
Rata-rata Capaian			93,64
<b>Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelayanan Publik Prima</b>			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.968.972.000,00	1.849.735.876,00	93,94
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	4.000.000,00	3.990.000,00	99,75
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	173.860.000,00	169.925.050,00	97,74
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	150.650.000,00	145.247.248,00	96,41
Program kerjasama informasi dengan mas media	422.166.700,00	419.879.900,00	99,46
Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika	704.660.400,00	683.442.183,00	96,99
Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	46.100.000,00	45.970.000,00	99,72
Program Peningkatat Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	533.063.700,00	515.225.640,00	96,65
Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel	97.400.000,00	97.340.000,00	99,94
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	165.360.000,00	163.196.900,00	98,69
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	120.050.000,00	118.421.656,00	98,64
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	228.425.000,00	225.889.797,00	98,89
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	700.950.000,00	687.408.829,00	98,07
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	485.735.500,00	475.159.645,00	97,82
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	3.607.800.000,00	3.603.017.165,00	99,87
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1.974.403.400,00	1.921.460.400,00	97,32
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	176.583.331,00	171.403.331,00	97,07
Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	176.583.331,00	171.403.331,00	97,07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	293.180.976,00	292.792.976,00	99,87
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	159.708.000,00	149.238.335,00	93,44
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	233.165.000,00	204.196.300,00	87,58
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	1.215.353.750,00	1.156.591.901,00	95,17
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	873.776.500,00	815.714.299,00	93,36
Jumlah	14.511.947.588	14.086.650.762	2233,46
Rata-rata Capaian			97,11
<b>Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</b>			
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	99.079.600,00	94.407.000,00	95,28
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	116.834.300,00	87.282.222,00	74,71
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	223.821.800,00	199.024.049,00	88,92
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.027.380.150,00	1.013.877.411,00	98,69
Program pengembangan destinasi pariwisata	1.760.594.000,00	1.712.297.416,75	97,26

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	84.483.000,00	83.983.000,00	99,41
Program pengembangan budidaya perikanan	819.614.700,00	816.247.000,00	99,59
Program pengembangan perikanan tangkap	1.448.507.500,00	1.420.275.537,00	98,05
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	312.610.000,00	310.685.000,00	99,38
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	355.981.000,00	334.676.000,00	94,02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.033.333.500,00	943.540.000,00	91,31
Program peningkatan produksi hasil peternakan	236.845.000,00	234.453.006,00	98,99
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	411.180.500,00	393.115.000,00	95,61
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.786.609.000,00	2.752.911.211,97	98,79
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	538.755.000,00	532.638.000,00	98,86
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	178.150.000,00	167.970.000,00	94,29
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	81.650.000,00	81.450.000,00	99,76
Jumlah	11.515.429.050,00	11.178.831.853,72	1622,92
Rata-rata Capaian			95,47
<b>Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	384.328.000,00	379.630.000,00	98,78
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6.474.552.000,00	6.386.806.992,00	98,64
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	794.213.650,00	784.684.158,00	98,80
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	62.500.000,00	62.000.000,00	99,20
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	133.080.000,00	129.617.500,00	97,40
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	165.033.121,00	164.985.000,00	99,97
Program pengembangan industri kecil dan menengah	124.000.379,00	124.000.379,00	100,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industry	92.072.400,00	87.326.200,00	94,85
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	2.138.196.100,00	1.071.417.121,46	50,11
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	235.026.850,00	230.496.950,00	98,07
Program Pengembangan SDM Kepariwisata	9.699.650,00	9.449.650,00	97,42
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	252.569.700,00	193.441.091,00	76,59
Jumlah	10.865.271.850,00	9.623.855.041,46	1109,83
Rata-rata Capaian			92,49
<b>Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Baik</b>			
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	57.813.770.408,37	56.366.443.897,74	97,50
Program pembangunan jalan dan jembatan	24.425.053.090,75	24.376.723.243,82	99,80
Program pembangunan turap/talud/bronjong	5.346.745.707,60	5.338.603.701,58	99,85
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	5.372.472.022,00	5.306.553.419,48	98,77

Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	359.450.000,00	357.410.000,00	99,43
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	620.920.000,00	546.444.481,00	88,01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4.691.312.425,00	4.461.409.532,23	95,10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.170.891.315,90	19.966.532.686,02	98,99
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.955.919.165,00	13.927.016.397,43	99,79
Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	9.464.703.165,10	9.217.749.389,00	97,39
Program Perencanaan Permukiman Kumuh	65.500.000,00	60.966.500,00	93,08
Program Pengembangan Kawasan	295.740.000,00	208.270.000,00	70,42
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	99.100.000,00	97.890.000,00	98,78
Program peningkatan pelayanan angkutan	664.500.000,00	643.433.000,00	96,83
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	901.925.000,00	870.466.700,00	96,51
Jumlah	144.248.002.299,72	141.745.912.948,3	1430,25
Rata-rata capaian			95,35

Sumber: BPKAD Kota Bima 2018, Data diolah

### 3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa *efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja outcome dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Apabila capaian kinerja dari sasaran strategis sama dengan atau lebih besar dari realisasi keuangan maka sasaran strategis yang telah dilaksanakan diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian kinerja dari sasaran lebih kecil dari pada realisasi keuangan, maka sasaran startegis yang dilaksanakan diklasifikasikan *tidak efisien*.

Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya setiap sasaran strategis Pemerintah Kota Bima tahun 2018.

**Tabel 3.59**  
**Hasil Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setiap Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran</b>	<b>Rata-Rata Realisasi Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1	Meningkatnya mutu pendidikan	84,95	82,04	<b>Efisien</b>
2	Meningkatnya daya saing	112,97	94,74	<b>Efisien</b>
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	79,24	94,19	<b>Tidak Efisien</b>
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	95,98	77,35	<b>Efisien</b>
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100,45	93,64	<b>Efisien</b>
6	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	101,25	97,11	<b>Efisien</b>
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	104	95,47	<b>Efisien</b>
8	Meningkatnya pendapatan masyarakat	87,60	92,49	<b>Tidak Efisien</b>
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	73,34	95,35	<b>Tidak Efisien</b>

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut diatas tergambar bahwa terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang penggunaan sumber dayanya efisien dan 3 (tiga) sasaran strategis yang dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya belum efisien terhadap penggunaan sumber daya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kinerja sebagaimana yang tertuang dalam BAB III, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2018 disimpulkan bahwa capaian sasaran, capaian indikator kinerja, serta akuntabilitas pendapatan dan belanja daerah disimpulkan sebagai berikut.

##### 1. Capaian Sasaran

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis. Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 9 (Sembilan) sasaran strategis tersebut sebesar 92,57% dengan kategori BERHASIL sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dan kategori CUKUP BERHASIL sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

##### 2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja dikategorikan BERHASIL, 3 (tiga) indikator kinerja KURANG BERHASIL dan 1 (satu) indikator kinerja TIDAK BERHASIL.

#### **B. Saran**

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, maka diperlukan adanya peningkatan kerja sama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN lingkup Pemerintah Kota Bima dalam hal perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
2. Peningkatan komitmen seluruh stakeholders pembangunan lingkup Pemerintah Kota Bima untuk membangun system akuntabilitas kinerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
3. Partisipasi instansi Pemerintah Provinsi NTB di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat untuk

memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga pengambilan kebijakan penetapan program dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien guna peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kota Bima dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bima yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.